LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK 2018

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENINDAKAN

HASIL KOORDINASI PENERIMAAN SPDP

INSTANSI	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	TOTAL
Kejaksaan	59	46	57	62	51	28	41	48	74	114	59	42	681
Kepolisian	65	51	19	65	103	18	50	40	41	21	48	14	535
Jumlah	124	97	76	127	154	46	91	88	115	135	107	56	1216

HASIL KOORDINASI PENANGANAN KASUS/PERKARA (327 KEGIATAN)

1. Dugaan TPK pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum *solar cell* pada Dinas Tata Kota Manado TA 2014 atas nama tersangka Drs. Johan Benny Mailangkay yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Utara.
   - Kegiatan Koordinasi: fasilitasi pencarian dan pengamanan orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 9 Januari 2018.
   - Hasil Koordinasi: Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Sulawesi Utara atas nama Drs. Johan Benny Mailangkay telah dipenuhi dan selesai dilaksanakan pada 9 Januari 2018.
2. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBD TA 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.673.211.000 serta Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBN TA 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.826.672.000 dengan terpidana atas nama DADANG PRIJATNA, SH dan atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA yang disidangkan oleh Kejari Kab. Tangerang.
   - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi rapat koordinasi dan Aanwijzing lelang tanah sebagai uang pengganti kerugian negara pada 24-25 Januari 2018.
   - Hasil Koordinasi: Pada 24 Januari 2018 telah diinformasikan jadwal pelaksanaan lelang kepada terpidana atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA dan bahwa tidak ada peserta yang mendaftar dalam Aanwijzing lelang tanah pada 25 Januari 2018.
3. Dugaan TPK penyertaan modal Pemerintah Daerah Kab. Nias pada PT. Riau Airlines TA 2007 sebesar Rp.6.000.000.000 atas nama tersangka BBB yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Nias.
   - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi Penyidik Polres Nias dalam pemberian keterangan Ahli dari BPKP, Ahli dari Kemendagri dan Ahli Hukum Administrasi Negara pada 29 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Medan.
   - Hasil Koordinasi: Ahli pada BPKP, Ahli pada Kemendagri dan Ahli Hukum telah memberikan keterangan dipersidangan di Pengadilan Negeri Medan pada 29 Januari 2018.
4. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Metro Jaya.
   - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 15 Januari 2018.
   - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
5. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Papua Barat.
   - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 21-23 Januari 2018.
   - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
6. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Papua.
   - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 22-27 Januari 2018.
   - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
7. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015 berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran Jasa *Cleaning Service* rumah jabatan Wali Kota Padang Panjang atas nama tersangka RLS dan MF yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang Panjang.
   - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Penyidik Polres dalam klarifikasi Surat Keterangan Dokter atas nama tersangka MF pada 9 Januari 2018.
   - Hasil Koordinasi: KPK memfasilitasi kegiatan klarifikasi Surat Keterangan Dokter atas nama tersangka MF pada 9 Januari 2018.
8. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Riau.
   - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 30 Januari 2018.
   - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
9. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Riau.
   - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 31 Januari 2018.
   - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
10. Dugaan TPK Penggunaan Anggaran Belanja Kursus-kursus Singkat (Pelatihan) Kode Rekening 120 15 0008 5221601 DPRD Kota Surabaya yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polrestabes Surabaya.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat Koordinasi bersama BPK RI terkait dengan perhitungan kerugian negara di Ruang Rapat Kolaborasi Lt. 12 Gedung KPK RI tanggal 8 Januari 2018.
    - Hasil Koordinasi: Penyidik perlu mendalami lagi terkait dengan pemenuhan bukti-bukti petunjuk untuk memperkuat hasil perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan oleh BPK RI. Kegiatan telah dilaporkan kepada Pimpinan KPK RI melalui Nota Dinas Deputi Bidang Penindakan.
11. Dugaan TPK Pada Proses Pengadaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan TA 2010 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Magetan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Polres Magetan dalam pemberian keterangan Ahli Teknis dari Universitas Gadjah Mada ditingkat penuntutan pada 12 Januari 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknis dari Universitas Gadjah Mada telah memberikan keterangan dipersidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada 12 Januari 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Pimpinan KPK RI melalui Nota Dinas Deputi Bidang Penindakan.
12. Dugaan TPK Proyek Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh di Kota Bengkulu TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Bengkulu.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi bersama KPK, Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Agung RI, dan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.
    - Hasil Koordinasi: Kegiatan koordinasi telah dilaporkan ke Pimpinan KPK melalui Nota Dinas Deputi Bidang Penindakan.
13. Dugaan TPK penjualan aset Pertamina berupa tanah di Simprug Jakarta Selatan pada 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Penyidik tidak dapat melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti karena tersangka melarikan diri dan telah dinyatakan dalam DPO. Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri meminta bantuan fasilitasi pencarian DPO (R/219/KOR.03/20-25/01/2018 tanggal 25 Januari 2018).
    - Pelaksanaan Koordinasi: KPK segera memfasilitasi pencarian DPO. Hasil koordinasi telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat tugas.
14. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Negeri DKI Jakarta.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 1 Februari 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
15. Dugaan TPK dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan nilai bantuan sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Tapanuli Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi awal terkait fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Hukum Pidana.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Hukum Pidana Universitas Diponegoro bersedia menjadi Ahli dalam perkara *a quo* dan akan

memberikan keterangan pada 13-15 Februari 2018.

16. Dugaan TPK dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan nilai bantuan sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Tapanuli Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Hukum Pidana Universitas Diponegoro pada 13-15 Februari 2018 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangannya pada kegiatan pengambilan keterangan Ahli oleh Penyidik Polres Tapsel tanggal 14 Februari 2018 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
17. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi awal terkait fasilitasi pengambilan keterangan Coastal Expert.
    - Hasil Koordinasi: Ahli dari Fakultas Teknik Kelautan ITB dapat membantu penyidikan perkara *a quo*, persuratan dengan ITB akan dilakukan setelah mendapatkan informasi mengenai Ahli yang akan membantu pada perkara dimaksud.
18. Dugaan TPK dalam pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 atas nama Terpidana MUHAMMAD SOFYAN alias H. ANDY SOFYAN LAKKI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi perkembangan pelimpahan penanganan proses hukum terhadap pihak lain yang turut didakwa bersama-sama dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009 atas nama Terpidana MUHAMMAD SOFYAN alias H. ANDY SOFYAN LAKKI dari KPK ke Bareskrim Polri.
    - Hasil Koordinasi: Bareskrim Polri akan menangani perkara tersebut dengan dukungan dan fasilitasi dari KPK terkait dengan dukungan dokumen dan pembiayaan dalam penanganan perkara dimaksud.
19. Dugaan TPK pada Pengadaan Kapal Patroli pada Kesatuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di Kemenhub TA. 2013-2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Pembahasan hasil cek fisik kapal patroli KPLP oleh PT. BKI bersama dengan pemeriksa dari BPK RI, penyidik Bareskrim Polri dan KPK.
    - Hasil Koordinasi: PT. BKI akan memberikan konsep laporan yang sudah ada sampai saat ini kepada Penyidik, Pemeriksa BPK RI dan Korsup KPK untuk dapat dipelajari dan dapat diberikan masukan lebih lanjut serta akan dilakukan pertemuan lanjutan terkait finalisasi laporan dari ahli teknis dan koordinasi lebih lanjut terkait penunjukan ahli dari PT. BKI guna pengambilan keterangan Ahli perkara ini.
20. Dugaan TPK Tukar Guling Tanah Bengkok Pemerintah Kota Tegal dengan Tanah Milik PT. COM yang terletak di Kawasan Bokong Semar Kota Tegal atas nama tersangka HARTOTO, BA bin H. SUTARNO (Alm) yang penyidikan dilaksanakan oleh Polres Kota Tegal.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Penyidik Polres Kota Tegal dalam serah terima Barang Bukti dari KPK kepada Kepolisian Resor Tegal Kota berkaitan dengan TPK yang sama dengan Terdakwa IKMAL JAYA, SE., SYAIFUL JAMIL, S.Sos, dan RUDYANTO, SE yang ditangani oleh KPK.
    - Hasil Koordinasi: KPK memfasilitasi kegiatan serah terima Barang Bukti dari KPK kepada Kepolisian Resor Tegal Kota berkaitan dengan TPK yang sama dengan Terdakwa IKMAL JAYA, SE., SYAIFUL JAMIL, S.Sos, dan RUDYANTO, SE yang ditangani oleh KPK pada 1 Februari 2018.
21. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015 berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran Jasa *Cleaning Service* rumah jabatan Wali Kota Padang Panjang atas nama tersangka RLS dan MF. yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang Panjang.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemantauan Persidangan atas nama Terdakwa RHICI LIMA SAZA dan MARIA FIRONIKA, ST., SE. di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Adapun agenda persidangan dimaksud adalah Pembacaan Nota Keberatan/Eksepsi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
    - Hasil Koordinasi: Atas Nota Keberatan/Eksepsi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Tim JPU menyatakan akan mengajukan tanggapan eksepsi secara tertulis yang akan dibacakan pada persidangan berikutnya, Kamis 8 Februari 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
22. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015 berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran Jasa *Cleaning Service* rumah jabatan Wali Kota Padang Panjang atas nama tersangka RHICI LIMA SAZA dan MF. yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang Panjang.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemantauan Persidangan atas nama Terdakwa RHICI LIMA SAZA dan MARIA FIRONIKA, ST., SE. di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Adapun agenda persidangan dimaksud adalah Pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim.
    - Hasil Koordinasi: Majelis Hakim menyatakan menolak Nota Keberatan atau Eksepsi Terdakwa RHICI LIMA SAZA dan MARIA FIRONIKA, ST., SE atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim memutuskan sidang perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang akan dilaksanakan pada 22 Februari 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
23. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Alwie Al Jufrie.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.
24. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Faizal Reza.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.
25. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Ferliean Southanto.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.
26. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Prihananto Giri Nugroho.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.
27. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Rudy Muhammad Saidi.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.
28. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Saiful Amal.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.
29. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Sudirman.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.

30. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Sunarya.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.
31. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Suryanta.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.
32. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Usman Nawing.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.
33. Dugaan TPK penyimpangan dalam pembangunan pemecah ombak pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli teknik dari Polines dan ahli dari LKPP terkait Persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Wawan Setiawan.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknik dari Polines dan LKPP telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Samarinda tanggal 5 Februari 2018.
34. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 21 Februari 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
35. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 22 Februari 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
36. Dugaan TPK dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan penguasaan tanah di kawasan HPT Tesso Nillo tahun 2003 dan 2004 Kabupaten Kampar yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kampar.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi ahli keuangan negara terkait persidangan perkara TPK tersebut atas nama terdakwa Zaiful Yusri, Dkk.
    - Hasil Koordinasi: Ahli keuangan negara telah memberikan keterangan di Persidangan PN Tipikor Pekanbaru tanggal 27 Februari 2018.
37. Dugaan TPK alih fungsi lahan pada Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada lokasi Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atas nama tersangka I Wayan Rubah yang penyidikannya dilaksanakan oleh penyidik Dit Krimsus Polda Bali.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi penyidik Polda Bali pada kegiatan permintaan pendapat ahli Administrasi Negara.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilakukan pengambilan keterangan Ahli Administrasi Negara oleh penyidik Polda Bali pada 28 Februari 2018.
38. Dugaan TPK alih fungsi lahan pada Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada lokasi Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atas nama tersangka I Wayan Rubah yang penyidikannya dilaksanakan oleh Dit Krimsus Polda Bali.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi penyidik Polda Bali pada kegiatan permintaan pendapat ahli Bidang Hukum Pertanahan.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilakukan pengambilan keterangan Ahli Hukum Pertanahan oleh Penyidik Polda Bali pada 28 Februari 2018.
39. Dugaan TPK terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04748/Kel. Taman Baloi atas nama PT. KARIMUN PINANG JAYA tanpa disertai bukti pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Kegiatan Koordinasi: Melakukan Fasilitasi Pemeriksaan Ahli Retribusi Pajak dan Derah pada 12 -14 Februari 2018 di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
    - Hasil Koordinasi: Dalam pengambilan keterangan Ahli pada intinya menyampaikan bahwa perkara *a quo* merupakan tindak pidana korupsi dan bukan tindak pidana pajak sehingga tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi.
40. Koordinasi terkait informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Polda Jambi pada 31 Januari 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Data Penanganan Perkara TPK kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
41. Koordinasi terkait informasi SPDP dan perkembangan penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejati Jambi pada 1 Februari 2018
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Data Penanganan Perkara TPK kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
42. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Polda Yogyakarta pada 20-21 Februari 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan Informasi perkembangan penanganan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
43. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Kejati Yogyakarta pada 20-21 Februari 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan Informasi perkembangan penanganan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas
44. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Aceh
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi dengan ahli teknis di Surabaya terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi pada 21-23 Februari 2018
    - Hasil Koordinasi: Kegiatan koordinasi telah dilaporkan ke Pimpinan KPK melalui Nota Dinas.
45. Koordinasi terkait data informasi 74 (tujuh puluh empat) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikan nya oleh Direktorat Tipidkor tahun 2015 sampai dengan 2017.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi (R/219/KOR.03/20-25/01/2018 tanggal 25 Januari 2018).
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi 74 (tujuh puluh empat) perkembangan penanganan Perkara TPK yang dilaksanakan penyidikan nya oleh Direktorat Tipidkor tahun 2015 sampai dengan 2017 (B/35/II/2018/Tipidkor tanggal 8 Februari 2018).
46. Koordinasi terkait pemuktahiran data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
    - Kegiatan koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan Nomor: B/242/II/WAS.2.5/2018/ Ditreskrimsus tanggal 8 Februari 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan perkara TPK.
47. Koordinasi terkait pemuktahiran data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
    - Kegiatan koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan Nomor: R-58/Q.2/Fd.1/01/2018 tanggal 31 Januari 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan perkara TPK.
48. Dugaan TPK penjualan aset Pertamina berupa tanah di Simprug Jakarta Selatan pada 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: KPK telah melaksanakan koordinasi dengan Dit Jend Imigrasi terkait perlintasan perjalanan luar negeri atas nama GH.
    - Hasil Koordinasi: Pada 21 Feb 2018, tersangka GH menyerahkan diri dan oleh penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri ditindaklanjuti dengan upaya paksa

penangkapan dan penahanan (Sprin. Han/01/II/2018/Tipidkor tanggal 21 Feb 2018)

49. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi awal terkait fasilitasi pemenuhan kebutuhan data kelautan di Kel. Ranoiapo Kab. Minahasa Selatan.
    - Hasil Koordinasi: Badan Informasi Geospasial (BIG) dapat membantu pemenuhan kebutuhan data kelautan serta Ahli terkait untuk membantu penyidikan perkara *a quo*.
50. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi awal terkait fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Teknik Kelautan.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknik Kelautan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dapat membantu penyidikan perkara *a quo*.
51. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi awal terkait fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Oseanografi.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Oseanografi dari Institut Teknologi Bandung pada dasarnya dapat membantu penyidikan perkara *a quo*, namun Ahli yang bersangkutan memiliki hubungan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan salah satu pengawas penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
52. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi antara Penyidik perkara *a quo*, Badan Informasi Geospasial, Ahli Teknik Sipil, Ahli Teknik Kelautan dan KPK pada 13 Maret 2018 bertempat di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: Akan dilaksanakan fasilitasi peninjauan lapangan pembangunan tembok pantai di Kel. Ranoiapo Kab. Minahasa Selatan pada 18-21 Maret 2018.
53. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Keuangan Negara pada 14 Maret 2018 di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangannya pada kegiatan pengambilan keterangan Ahli oleh Penyidik Kejari Minahasa Selatan tanggal 14 Maret 2018 di Gedung Merah Putih KPK.
54. Dugaan TPK dalam pengadaan cadangan batubara oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Batubara (PT. PLN BB) yang bekerja sama dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Keuangan Negara pada 14 Maret 2018 di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangannya pada kegiatan pengambilan keterangan Ahli oleh Penyidik Kejati DKI Jakarta tanggal 14 Maret 2018 di Gedung Merah Putih KPK.
55. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi peninjauan lapangan pembangunan tembok pantai di Kel. Ranoiapo Kab. Minahasa Selatan bersama Kejati DKI Jakarta, Badan Informasi Geospasial, Ahli Teknik Sipil, Ahli Teknik Kelautan dan BPK RI.
    - Hasil Koordinasi: Berdasarkan peninjauan lapangan Ahli dari Badan Informasi Geospasial dan Ahli Teknik Kelautan yang terlibat sepakat bahwa pembangunan tembok pantai dimaksud tidak tepat dilihat dari berbagai aspek. Di dalam keterangannya, Ahli lebih merekomendasikan untuk dibangun soft protection pada lokasi pantai Kel. Ranoiapo dengan menanam bakau di sepanjang garis pantai.
56. Dugaan TPK penyalahgunaan dana dekonsentrasi bersumber dari P-APBN sebesar Rp.41.809.700.000 Pemerintah Desa se-Sumatera Utara untuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sumatera Utara.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemantauan persidangan atas nama terdakwa BUDHIYANTO SURYANATHA dan RAHMAT JAYA PRAMANA dengan agenda sidang pembacaan tuntutan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Medan.
    - Hasil Koordinasi: Persidangan dengan agenda sidang pembacaan tuntutan atas nama terdakwa BUDHIYANTO SURYANATHA dan RAHMAT JAYA PRAMANA ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018.
57. Dugaan TPK penyalahgunaan dana dekonsentrasi bersumber dari P-APBN sebesar Rp.41.809.700.000 Pemerintah Desa Se-Sumatera Utara untuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sumatera Utara.
    - Kegiatan Koordinasi: Pematauan persidangan atas nama terdakwa BUDHIYANTO SURYANATHA dan RAHMAT JAYA PRAMANA dengan agenda sidang pembacaan tuntutan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Medan.
    - Hasil Koordinasi: Terdakwa atas nama BUDHIYANTO SURYANATHA dituntut 2 (dua) tahun penjara, denda Rp 50.000.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan membayar uangan pengganti Rp 64.000.000.000 (enam puluh empat juta rupiah). Terdakwa atas nama BUDHIYANTO SURYANATHA dituntut 2 (dua) tahun penjara dan membayar uangan pengganti Rp 157.000.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah)
58. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi pada 13-14 Maret 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
59. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi pada 13-14 Maret 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
60. Perkara Pengembangan OTT Pungutan Liar UPTD BLKKH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Polda Sumatera Barat dalam pengambilan keterangan ahli keuangan negara dalam penanganan perkara Pengembangan OTT Pungutan Liar UPTD BLKKH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangan Ahli dan dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Polda Sumatera Barat. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
61. Dugaan TPK Tukar Guling Tanah Bengkok Pemerintah Kota Tegal dengan Tanah Milik PT. COM yang terletak di Kawasan Bokong Semar Kota Tegal yang penyidikan dilaksanakan oleh Polres Kota Tegal.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Penandatanganan Berkas-Berkas Penyitaan Barang Bukti dari KPK kepada Penyidik Polres Kota Tegal berkaitan dengan TPK yang sama dengan Terdakwa IKMAL JAYA, SE., SYAIFUL JAMIL, S.Sos, dan RUDYANTO, SE yang ditangani oleh KPK.
    - Hasil Koordinasi: KPK memfasilitasi penandatanganan Berkas-Berkas Penyitaan Barang Bukti dari KPK kepada Kepolisian Resor Tegal Kota berkaitan dengan TPK yang sama dengan Terdakwa IKMAL JAYA, SE., SYAIFUL JAMIL, S.Sos, dan RUDYANTO, SE yang ditangani oleh KPK pada 22 Maret 2018.
62. Dugaan TPK penyalahgunaan dana APBD-P Kota Cimahi TA 2006 dan APBD Kota Cimahi TA 2007 dalam Penyertaan Modal Daerah Kota Cimahi pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri dan PT. Lingga Buana Wisesa dalam rangka pembangunan Pasar Raya Cibeureum dan Pembangunan Sub Terminal yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari Cimahi.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi penyidik Kejari Cimahi pada kegiatan permintaan pendapat ahli Keuangan Negara.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Keuangan Negara telah memberikan pendapat dalam BAP atas nama tersangka II, RDS dan IT pada 13 Maret 2018.
63. Dugaan TPK Pembangunan Turap/*Sheet Pile* di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara TA. 2010-2015 yang ditangani oleh Penyidik Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim Polri dalam kegiatan rapat

koordinasi bersama ahli konstruksi, jaksa peneliti, dan auditor BPK RI terkait rencana persiapan pemeriksaan fisik atas perkara *a quo*.
- Hasil Koordinasi: KPK akan memfasilitasi Penyidik Bareskrim Polri untuk melaksanakan pemeriksaan fisik bersama Ahli Konstruksi, Jaksa Peneliti, dan Auditor BPK RI.

64. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Maluku Utara.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 28 Maret 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
65. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 29 Maret 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
66. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulsel.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi bersama Ahli Teknik dari ITB pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018.
    - Hasil Koordinasi: Kegiatan koordinasi telah dilaporkan ke Pimpinan KPK melalui Nota Dinas Deputi Bidang Penindakan Nomor: 57/KOR.01.12/25/03/2018 Tanggal 14 Maret 2018.
67. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Aceh.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Kejati Aceh dalam Pengambilan Keterangan Ahli Struktur ditingkat penyidikan pada 13-14 Maret 2018. (Tahap Penyidikan)
    - Hasil Koordinasi: Penyidik Kejati Aceh telah melakukan pengambilan keterangan Ahli Struktur dan membuat Berita Acara tanggal 14 Maret 2018.
68. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Polda Maluku
    - Kegiatan Koordinasi: Pemuktahiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi pada 20-23 Maret 2018
    - Hasil Koordinasi: Laporan Data dan Informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
69. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Kejati Maluku
    - Kegiatan Koordinasi: Pemuktahiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervise pada 20-23 Maret 2018
    - Hasil Koordinasi: Laporan Data dan Informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
70. Dugaan TPK adanya dugaan penyimpangan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang penyidikannya dilakukan oleh Kejati Aceh.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Kejati Aceh dalam Pengambilan Keterangan Ahli Hukum Keuangan Negara ditingkat penyidikan pada 26 Maret 2018. (Tahap Penyidikan)
    - Hasil Koordinasi: Penyidik Kejati Aceh telah melakukan pengambilan keterangan Ahli Hukum Keuangan Negara dan membuat Berita Acara tanggal 26 Maret 2018.
71. Dugaan TPK penyalahgunaan dana dekonsentrasi bersumber dari P-APBN sebesar Rp.41.809.700.000 Pemerintah Desa se-Sumatera Utara untuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sumatera Utara.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemantauan persidangan atas nama terdakwa BUDHIYANTO SURYANATHA dan RAHMAT JAYA PRAMANA dengan agenda sidang pembacaan putusan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 di Pengadilan Negeri Medan.
    - Hasil Koordinasi: Terdakwa atas nama BUDHIYANTO SURYANATHA divonis dengan pidana badan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, denda Rp 50.000.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uangan pengganti Rp 64.000.000.000 (enam puluh empat juta rupiah). Terdakwa atas nama RAHMAT JAYA PRAMANA divonis dengan pidana badan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta membayar uang pengganti Rp 311.000.000.000 (tiga ratus sebelas juta rupiah).
72. Dugaan TPK dalam pengadaan cadangan batubara oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Batubara (PT. PLN BB) yang bekerja sama dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi peninjauan lapangan terhadap lokasi tambang batubara PT. Tansri Madjid Energy di Muara Enim Sumatera Selatan pada 3-6 Mei 2018 bersama Kejati DKI Jakarta dan BPKP.
    - Hasil Koordinasi: Berdasarkan peninjauan lapangan terhadap lokasi tambang batubara PT. Tansri Madjid Energy yang berada di 4 (empat) Kecamatan (Belimbing, Talang Ubi, Gunung Megang dan Rambang Dangku) secara keseluruhan belum terlihat adanya kegiatan penambangan batubara namun pada beberapa titik ada tanda pernah dilakukan pengeboran dalam rangka penyelidikan kualitas dan kuantitas batubara yang ada didalam tanah.
73. Dugaan TPK dalam pengadaan cadangan batubara oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Batubara (PT. PLN BB) yang bekerja sama dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi pada 11 April 2018 bersama Kejati DKI Jakarta dan KPK mengenai fasilitasi pelacakan aset pelacakan aset-aset yang terkait dengan perkara.
    - Hasil Koordinasi: KPK akan memfasilitasi pelacakan aset terkait perkara *a quo* dengan Unit Kerja Koorsup Penindakan sebagai penghubung. Dalam rangka fasilitasi dimaksud, Kejati DKI Jakarta akan memenuhi kebutuhan dokumen dan informasi yang diperlukan oleh KPK.
74. Dugaan TPK dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi Jakarta periode 2011-2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi pada 11 April 2018 bersama Kejati DKI Jakarta dan KPK mengenai fasilitasi pelacakan aset pelacakan aset-aset yang terkait dengan perkara.
    - Hasil Koordinasi: KPK akan memfasilitasi pelacakan aset terkait perkara *a quo* dengan Unit Kerja Koorsup Penindakan sebagai penghubung. Dalam rangka fasilitasi dimaksud, Kejati DKI Jakarta akan memenuhi kebutuhan dokumen dan informasi yang diperlukan oleh KPK.
75. Dugaan TPK dalam pengadaan cadangan batubara oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Batubara (PT. PLN BB) yang bekerja sama dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Keuangan Negara pada 12 April 2018 di Hotel Sofyan Cikini Jakarta Pusat.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangannya pada kegiatan pengambilan keterangan Ahli oleh Penyidik Kejati DKI Jakarta tanggal 12 April 2018 di Hotel Sofyan Cikini Jakarta Pusat.
76. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan data pasang surut dan arus Teluk Ranoiapo Kab. Minahasa Selatan bersama Kejari Minahasa Selatan dan Badan Informasi Geospasial pada 15-20 April 2018.
    - Hasil Koordinasi: Fasilitasi pengambilan data pasang surut dan arus Teluk Ranoiapo Kab. Minahasa Selatan baru dapat dilaksanakan 50% karena terkendala current meter yang belum dapat berfungsi dan harus dilakukan *update system* di Jakarta. Pengambilan data pasang surut dan arus dimaksud akan dilanjutkan pada awal Mei 2018.
77. Dugaan TPK dalam pengadaan cadangan batubara oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Batubara (PT. PLN BB) yang bekerja sama dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi antara Penyidik perkara dan KPK terkait persiapan fasilitasi penyitaan tanah lokasi tambang batubara PT. TME di Muara Enim Sumatera Selatan pada 27 April 2018 bertempat di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: Terhadap 107 (seratus tujuh) persil tanah lokasi tambang batubara PT. TME yang terbagi menjadi 7 (tujuh) blok di Muara Enim Sumaera Selatan akan disita pada 7 Mei 2018. Adapun pemasangan 13 (tiga belas) plang sita dari Kejati DKI Jakarta pada fisik tanah akan dilakukan pada 8-11 Mei 2018.
78. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi pada 10-12 April 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan

informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.

79. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi pada 10-12 April 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
80. Dugaan TPK Penyimpangan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) AT-TIN MURAKATA Tahun Anggaran 2013 dengan nama tersangka DU yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Hulu Sungai Tengah.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemantauan Persidangan atas nama Terdakwa DIA UDINI, SPd, MM di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banjarmasin. Agenda persidangan dimaksud adalah pembacaan Replik oleh Jaksa Penuntut Umum.
    - Hasil Koordinasi: Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum untuk memberikan tanggapan atas Replik yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena tanggapan atas Replik yang belum siap, maka sidang dengan agenda pembacaan Duplik dari Penasehat Hukum dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 April 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepda Deputi Bidang Penindakan.
81. Dugaan TPK pembangunan Lembaga Permasyarakatan Dharmasraya TA 2014 yang menggunakan APBN TA 2014 pada Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Dharmasraya.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi/ gelar perkara bersama dengan Polres Dharmasraya dan Auditorat Utama Investigasi BPK RI terkait perkara Perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Lembaga Permasyarakatan Dharmasraya TA 2014 yang menggunakan APBN TA 2014 pada Kementrian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat.
    - Hasil Koordinasi: Simpulan dan Rekomendasi Ekspose tanggal 3 April 2018. Kegiatan telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan.
82. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dan jabatan pengangkatan Tenaga Honorer K-II menjadi CPNS Kab. Dompu formasi tahun 2013/ 2014 TA. 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Nusa Tenggara Barat.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi/ gelar perkara dengan Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat terkait hambatan yang dialami penyidik dalam penyidikan perkara *a quo*.
    - Hasil Koordinasi: Simpulan dan Rekomendasi Ekspose tanggal 16 April 2018. Kegiatan telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan.
83. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015 berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran Jasa *Cleaning Service* rumah jabatan Wali Kota Padang Panjang atas nama tersangka RLS dan MF yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang Panjang.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi pemeriksaan Ahli TPPU atas nama ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM dalam persidangan terdakwa MARIA FIRONIKA, ST. SE di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangan di persidangan tipidkor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Kegiatan telah dilaporkan kepda Deputi Bidang Penindakan.
84. Dugaan TPK Pembangunan Turap/*Sheet Pile* di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara TA 2010-2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi penyidik Bareskrim Polri dalam melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan turap/*Sheet Pile* dengan bantuan ahli konstruksi.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi pada 9-15 April 2018 dan diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Fisik dari penyidik Bareskrim Polri.
85. Dugaan TPK berupa penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap program kegiatan Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung Bukit Suligi Blok A seluas 250 Ha yang bersumber dari APBN TA 2010, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polres Rokan Hulu.
    - Kegiatan Koordinasi: Gelar perkara bersama.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik polres Rokan Hulu, Jaksa Peneliti Kejari Rokan Hulu, Jaksa pada Kejati Riau, serta KPK pada 24 April 2018, yang pada intinya penyidik perlu segera menyerahkan berkas

tersangka yang sudah memenuhi unsur pasal kepada jaksa peneliti dan menelaah kembali penetapan tersangka lainnya yang tidak cukup alat bukti.

86. Dugaan TPK dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan terhadap penggunaan dana APBN-DPIPD TA. 2010 untuk pekerjaan pembangunan Jalan Bangkinang menuju Ranah Singkuang Kec. Kampar Kab. Kampar, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kampar.
    - Kegiatan Koordinasi: Gelar Perkara bersama.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Kampar, Penyidik Polda Riau, Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau, serta KPK pada 26 April 2018, yang pada intinya dalam rangka memenuhi unsur pasal yang disangkakan kepada calon tersangka, penyidik akan memperdalam perbuatan melawan hukum calon tersangka dan melengkapi dokumen untuk keperluan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor.
87. Koordinasi terkait informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Polda Kepulauan Riau pada 4 April 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Data Penanganan Perkara TPK kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
88. Koordinasi terkait informasi SPDP dan perkembangan penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejati Kepulauan Riau pada 5 April 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Data Penanganan Perkara TPK kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
89. Koordinasi terkait informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Polda Sulawesi Tenggara pada 18 April 2018
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Data Penanganan Perkara TPK kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
90. Koordinasi terkait informasi SPDP dan perkembangan penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejati Sulawesi Tenggara pada 19 April 2018
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Data Penanganan Perkara TPK kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
91. Dugaan TPK pada Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Aceh.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Kejati Aceh dalam Pengambilan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP pada 4-5 April 2018.
    - Hasil Koordinasi: Penyidik Kejati Aceh telah melakukan pengambilan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa LKPP dan membuat Berita Acara tanggal 5 April 2018.
92. Dugaan TPK Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan Nilai Kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi bersama Penyidik Polda Sulawesi Selatan dan BPK RI pada hari Rabu tanggal 18 April 2018.
    - Hasil Koordinasi: Kegiatan koordinasi telah dilaporkan ke Pimpinan KPK melalui Nota Dinas.
93. Dugaan TPK Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan Nilai Kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi bersama Penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Ahli Teknis ITB pada hari Kamis tanggal 19 April 2018.
    - Hasil Koordinasi: Kegiatan koordinasi telah dilaporkan ke Pimpinan KPK melalui Nota Dinas.
94. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: koordinasi dengan ahli teknik terkait rencana fasilitasi memfasilitasi penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri pada kegiatan permintaan pendapat ahli teknis dan rencana pengecekan fisik pekerjaan.
    - Hasil Koordinasi: Tim ahli teknis bersedia bersedia melaksanakan cek fisik pekerjaan dan memberikan pendapat di tahap penyidikan dan penuntutan.
95. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/ lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang

tahun anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
- Kegiatan Koordinasi: koordinasi dengan ahli teknik terkait rencana fasilitasi memfasilitasi penyidik Kejari Palembang pada kegiatan permintaan pendapat ahli teknis dan rencana pengecekan fisik pekerjaan.
- Hasil Koordinasi: Tim ahli teknis bersedia bersedia melaksanakan cek fisik pekerjaan dan memberikan pendapat di tahap penyidikan dan penuntutan.

96. Pemuktahiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi di Polda Sumatera Selatan.
    - Kegiatan koordinasi: Koordinasi perkembangan penyidikan perkara TPK yang dilaksanakan pada 9 April 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
97. Pemuktahiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
    - Kegiatan koordinasi: Koordinasi perkembangan penyidikan perkara TPK yang dilaksanakan pada 11 April 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
98. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat ahli Keuangan Negara (kegiatan dilaksanakan tanggal 20 April 2018 sebagai tindak lanjut bantuan fasilitasi kepada Bareskrim Polri).
    - Hasil Koordinasi: Ahli Keuangan Negara telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka PW.
99. Pemuktahiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi di Kepolisian Daerah Lampung.
    - Kegiatan koordinasi: Koordinasi perkembangan penyidikan perkara TPK yang dilaksanakan pada 23 April 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
100. Pemuktahiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi di Kejaksaan Tinggi Lampung.
    - Kegiatan koordinasi: Koordinasi perkembangan penyidikan perkara TPK yang dilaksanakan pada 25 April 2018 di Kejati Lampung.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
101. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi rapat koordinasi Ahli Teknik Kelautan ITS dan Pemeriksa dari BPK RI terkait penyusunan laporan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknik Kelautan ITS bertempat di Fakultas Teknik Kelautan ITS Surabaya pada 30 April 2018.
    - Hasil Koordinasi: laporan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknik Kelautan ITS telah cukup mendukung Penyidik dan BPK RI dalam menyusun dasar penentuan metode perhitungan kerugian keuangan negara yang akan diterapkan dalam PKN perkara *a quo*.
102. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan data pasang surut dan arus Teluk Ranoiapo Kab. Minahasa Selatan bersama Kejari Minahasa Selatan dan Badan Informasi Geospasial pada 2-6 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Fasilitasi pengambilan data pasang surut dan arus Teluk Ranoiapo Kab. Minahasa Selatan telah dilaksanakan, seluruh data terkait akan menjadi laporan Ahli BIG dalam penguatan unsur perkara *a quo*.
103. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat tembok pantai Desa Ongkaw pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan data pasang surut perairan Laut Sulawesi di daerah Desa Ongkaw Kec. Sinon Sayang Minahasa Selatan bersama Kejari Minahasa Selatan dan Badan Informasi Geospasial pada 2-6 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Fasilitasi pengambilan data pasang surut perairan Laut Sulawesi di daerah Desa Ongkaw Kec. Sinon Sayang Minahasa Selatan masih terus berlanjut sampai dengan tanggal 3 Juni 2018.
104. Dugaan TPK dalam pengadaan cadangan batubara oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Batubara (PT. PLN BB) yang bekerja sama dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi penyitaan tanah lokasi tambang batubara PT. TME di Muara Enim Sumatera Selatan pada 7-11 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Telah dipasang 13 (tiga belas) plang sita dari Kejati DKI Jakarta terhadap 107 (seratus tujuh) persil tanah lokasi tambang batubara PT. TME di Muara Enim Sumaera Selatan berdasarkan penetapan dari Ketua PN Muara Enim Nomor: 219/Pen.Pid/2018/PN Mre tanggal 23 April 2018.
105. Dugaan TPK pada Pengadaan Kapal Patroli pada Kesatuan Kerja Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di Kemenhub TA. 2013-2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi dengan Dit. Tipidkor Bareskrim Polri, Jampidsus Kejagung RI, BPK RI dan PT. BKI terkait hasil pemeriksaan fisik kapal patroli KPLP pada 23 Mei 2018 di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: BPK RI akan segera menyelesaikan LHP PKN perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan fisik setelah mendapatkan beberapa dokumen dari penyidik.
106. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Pemeriksa Pajak terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Cengkareng Jakarta Barat untuk Tahun Pajak 2016 yang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi terkait rencana pelimpahan penanganan perkara pada 22 Mei 2018 di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: Telah tergambar adanya tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Supervisor Tim Pemeriksa Pajak. Terkait rencana pelimpahan penanganan perkara *a quo* Unit Koorsupdak akan berkoordinasi dengan Dit. Penyidikan Jampidsus Kejagung RI untuk diaksanakan gelar perkara oleh Dit. Penyelidikan KPK dan IBI KMK.
107. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi pada 23-25 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
108. Dugaan TPK Penggunaan APBDes Tahun 2014-2015 Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Demak.
    - Kegiatan Koordinasi: Pelaksanaan kegiatan Gelar Perkara Kedua terkait dengan penanganan perkara *a quo*.
    - Hasil Koordinasi: Telah dibuat Simpulan dan Rekomendasi sebagai hasil dari pelaksanaan Gelar Perkara Kedua.
109. Dugaan TPK dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat yang memeriksakan dan mengobati hewan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan (BLKKH) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sumatera Barat.
    - Kegiatan Koordinasi: koordinasi fasilitasi pemeriksaan Ahli di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangan di persidangan tipidkor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Kegiatan telah dilaporkan kepda Deputi Bidang Penindakan.
110. Dugaan TPK Pembangungan Jalan Sadaunta-Lindu dan Jalan Peana-Kalamanta pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi TA 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Kejati Sulawesi Tengah.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi/ gelar perkara bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangungan Jalan Sadaunta-Lindu dan Jalan Peana-Kalamanta pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi TA 2015.
    - Hasil Koordinasi: Simpulan dan Rekomendasi Ekspose. Kegiatan telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan.
111. Dugaan TPK Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer K-II Menjadi CPNS Kabupaten Dompu Formasi Tahun 2013/2014 T.A 2015.
    - Kegiatan Koordinasi: Ekspose terpadu bersama dengan Kepolisian Daerah NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Pidsus Kejagung RI, Pengawasan Kejagung RI dan Bareskrim Polri terkait penanganan perkara *a quo*.

- Hasil Koordinasi: Simpulan dan Rekomendasi Ekspose. Kegiatan telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan

112. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 2 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
113. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 3 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
114. Dugaan TPK Alih Fungsi Lahan pada Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada Lokasi Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polda Bali.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada hari 15 Mei 2018.
115. Dugaan TPK Alih Fungsi Lahan pada Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada Lokasi Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polda Bali.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada15 Mei 2018.
116. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 25 Mei 2018.
117. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 25 Mei 2018.
118. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan dan Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka N.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan dan Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 25 Mei 2018.
119. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan dan Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka N.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan dan Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 25 Mei 2018.
120. Dugaan TPK terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04748/Kel. Taman Baloi atas nama PT. KARIMUN PINANG JAYA tanpa disertai bukti pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi
    - Kegiatan Koordinasi: Melakukan Koordinasi dengan Ahli Hukum Administrasi Negara pada 26-27 April 2018 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
    - Hasil Koordinasi: Dari Koordinasi tersebut diperoleh hasil bahwa Ahli Hukum Adinistrasi Negara Bp. Dr. W. Riawan Tjandra S.H, M.Hum bersedia untuk memberikan keterangan Ahli pada 8 Mei 2018 di Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Batam.
121. Dugaan TPK terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04748/Kel. Taman Baloi atas nama PT. KARIMUN PINANG JAYA tanpa disertai bukti pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi
    - Kegiatan Koordinasi: Melakukan Koordinasi Fasilitasi pemeriksaan Ahli Hukum Administrasi Negara Bp. Dr. W. Riawan Tjandra S.H, M.Hum pada 8 Mei 2018 di Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Batam.
    - Hasil Koordinasi: Dalam pengambilan keterangan Ahli pada intinya menyampaikan terkait penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dilakukan oleh Kasi Hak Tanak dan Pendaftaran Tanah tanpa melalui prosedur pembayaran BPHTB dan terkait pengenaan sanksi kumulatif baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Tersangka.
122. Dugaan TPK terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak dengan menggunakan Anggaran APBN-P Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Tanjung Pinang.
    - Kegiatan Koordinasi: Melakukan kegiatan Koordinasi dengan BPK dan Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 7-9 Mei 2019 .
    - Hasil Koordinasi: Dari koordinasi tersebut diperoleh hasil bahwa untuk menentukan waktu pelaksanaan cek fisik akan dikoordinasikan terlebih dahulu bersama penyidik pada Polres Tanjung Pinang dan Ahli dari Teknis Sipil Kelautan yang akan dilaksanakan pada 15-18 Mei 2018 di Tanjung Pinang dan Pekanbaru.
123. Dugaan TPK terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak dengan menggunakan Anggaran APBN-P Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Tanjung Pinang.
    - Kegiatan Koordinasi: Melakukan kegiatan Koordinasi dengan Penyidik Polres Tanjungpinang dan Ahli Teknik Sipil kelautan dari Universitas Riau di Pekanbaru dan Tanjung Pinang pada 15-18 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Kegiatan Cek fisik dilakukan pada 23-25 Mei 2018 di Pelabuhan Laut Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
124. Dugaan TPK terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak dengan menggunakan Anggaran APBN-P Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Tanjung Pinang.
    - Kegiatan Koordinasi: Melakukan kegiatan Koordinasi Cek Fisik *Break Water* pada Pelabuhan Laut Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau bersama Penyidik Polres Tanjungpinang, Ahli Teknik Sipil kelautan dari Universitas Riau dan BPK RI pada 23-25 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Kegiatan Cek fisik telah dilakukan di Pelabuhan Laut Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
125. Koordinasi terkait informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Polda jawa Timur pada 23 Mei 2018
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Data Penanganan Perkara TPK kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
126. Koordinasi terkait informasi SPDP dan perkembangan penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejati Jawa Timur pada 24 Mei 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Data Penanganan Perkara TPK kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan
127. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Polda Sulawesi Selatan pada 14-18 Mei 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Kegiatan koordinasi telah dilaporkan ke Pimpinan KPK melalui Nota Dinas.
128. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Polda Sulawesi Barat pada 23-25 Mei 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Kegiatan koordinasi telah dilaporkan ke Pimpinan KPK melalui Nota Dinas.
129. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Kejati Sulawesi Barat pada 23-25 Mei 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Kegiatan koordinasi telah dilaporkan ke Pimpinan KPK melalui Nota Dinas.
130. Koordinasi perkembangan penyidikan perkara TPK yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
    - Kegiatan koordinasi: Koordinasi perkembangan penyidikan perkara TPK yang dilaksanakan pada 2 Mei 2018 di Polda Kalimantan Tengah.
    - Hasil Koordinasi: Laporan perkembangan penyidikan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
131. Koordinasi perkembangan penyidikan perkara TPK yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi

Kalimantan Tengah.
- Kegiatan koordinasi: Koordinasi perkembangan penyidikan perkara TPK yang dilaksanakan pada 3 Mei 2018 di Kejati Kalimantan Tengah.
- Hasil Koordinasi: Laporan perkembangan penyidikan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.

132. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat ahli teknis yang dilaksanakan tanggal 8 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknik Geologi telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka PW.
133. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat ahli teknis yang dilaksanakan tanggal 8 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknik Perminyakan telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka PW.
134. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/ lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
    - Kegiatan Koordinasi: koordinasi dengan ahli teknik terkait rencana fasilitasi memfasilitasi penyidik Kejari Palembang pada kegiatan permintaan pendapat ahli teknis dan rencana pengecekan fisik pekerjaan (kegiatan dilaksanakan pada 8 Mei 2018).
    - Hasil Koordinasi: Tim Ahli teknis bersedia melaksanakan cek fisik pekerjaan dan memberikan pendapat di tahap penyidikan dan penuntutan.
135. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/ lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Kejari Palembang pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan tanggal 31 Mei 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Pengadaan Barang/ Jasa telah memberikan pendapat dalam BAP.
136. Dugaan TPK Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dana APBD tahun anggaran 2013 atas nama terdakwa TEDDI JUNIASTANTO yang ditangani oleh Kejati Sumatera Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa dalam persidangan terdakwa TEDDI JUNIASTANTO tanggal 31 Mei 2018 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Pengadaan Barang/ Jasa telah memberikan keterangan pada persidangan di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Mei 2018.
137. Dugaan TPK Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dana APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa TEDDI JUNIASTANTO yang ditangani oleh Kejati Sumatera Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Ahli Teknik Sipil dalam persidangan terdakwa TEDDI JUNIASTANTO tanggal 31 Mei 2018 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknik Sipil telah memberikan keterangan pada persidangan di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Mei 2018.
138. Dugaan TPK Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dana APBD Tahun Anggaran 2013 atas nama terdakwa TEDDI JUNIASTANTO yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sumatera Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam persidangan terdakwa TEDDI JUNIASTANTO tanggal 31 Mei 2018 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara telah memberikan keterangan pada persidangan di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 31 Mei 2018.
139. Dugaan TPK Pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk. CBC Bandung 1 kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung atas nama tersangka PPW.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi penitipan penahanan tersangka pada tahap penyidikan.
    - Hasil Koordinasi: Tersangka PPW telah ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.
140. Dugaan TPK Pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk. CBC Bandung 1 kepada PT. Tirta Amarta Bottling Company yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung atas nama tersangka TS.

    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi penitipan penahanan tersangka pada tahap penyidikan.
    - Hasil Koordinasi: Tersangka TS telah ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.
141. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat tembok pantai Desa Ongkaw pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan data pasang surut perairan Laut Sulawesi di daerah Desa Ongkaw Kec. Sinon Sayang Minahasa Selatan bersama Kejari Minahasa Selatan dan Badan Informasi Geospasial pada 28 Mei-6 Juni 2018.
    - Hasil Koordinasi: Pada 29 Mei 2018 telah dilaksanakan pemasangan alat pasang surut *portable offline* dan perbaikan alat pasang surut *portable online* di Desa Ongkaw. Pengukuran pasang surut di Desa Ongkaw dimaksud masih akan berlanjut hingga bulan Juli 2018. Telah dilaksanakan juga pengukuran GPS geodetic BM Desa Ongkaw selama 36 jam sejak tanggal 29 Mei 2018.
142. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi computer forensic pada 3-8 Juni 2018 di Minahasa Selatan.
    - Hasil Koordinasi: Telah diekstrak oleh Tim CF KPK barang bukti elektronik dari penyidik Kejari Minahasa Selatan berupa 3 buah handphone dan 3 buah *flashdrive*. Adapun hasil ekstrak telah diserahkan kepada penyidik perkara *a quo*.
143. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka CC.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
144. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka CC.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
145. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka CC.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 29 Mei 2018.
146. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka MY.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
147. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka MY.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
148. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka MY.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 29 Mei 2018.
149. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di

bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka N.
- Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.

150. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka N.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
151. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka N.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 29 Mei 2018.
152. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka RPM.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
153. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka RPM.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
154. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Kordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka RPM.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 29 Mei 2018.
155. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka R.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
156. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka R.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
157. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka R.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 29 Mei 2018.
158. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka AK.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
159. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka AK.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
160. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka AK.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 29 Mei 2018.
161. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka S.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
162. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka S.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 28-29 Mei 2018.
163. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka S.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 29 Mei 2018.
164. Dugaan TPK Dana Bantuan Hibah Pembangunan Pura Pemaksan Arak Api yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Tabanan.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka IMP
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 28 Mei 2018.
165. Dugaan TPK Dana Bantuan Hibah Pembangunan Pura Pemaksan Arak Api yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Tabanan.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka INSA.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 28 Mei 2018.
166. Dugaan TPK terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04748/Kel. Taman Baloi atas nama PT. KARIMUN PINANG JAYA tanpa disertai bukti pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kepulauan Riau.
    - Kegiatan Koordinasi: Melakukan Koordinasi dengan Ahli Hukum Acara Pidana dalam Sidang Praperadilan pada 6-8 April 2018 di Pengadilan Negeri Klas 1 Batam, Kepulauan Riau.
    - Hasil Koordinasi: Dalam persidangan tersebut Ahli pada intinya menjelaskan terkait hakikat Pra Peradilan, jangka waktu dalam penetapan tersangka serta terkait perbedaan hukum administratif dan hukum pidana.
167. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Polda Aceh
    - Kegiatan Koordinasi: Pemuktahiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi pada 4-7 Juni 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
168. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Kejati Aceh.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemuktahiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan supervisi pada 4-7 Juni 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
169. Dugaan TPK Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan Nilai Kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi bersama Ahli Teknis ITB pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018.
    - Hasil Koordinasi: Akan dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Cek Fisik Penyidik Polda Sulsel terkait perkara *a quo* di Palopo, Makassar pada 11-15 Juni 2018 bersama Tim Ahli dari ITB dan Auditor BPK RI. Kegiatan koordinasi telah dilaporkan ke Pimpinan KPK melalui Nota Dinas Deputi Bidang Penindakan.

170. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Aparat Penegak Hukum terkait penanganan perkara pidana umum di Pengadilan Negeri Rengat dan/atau Pengadilan Negeri Kuantan Singingi tahun 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi antara direktorat penyelidikan KPK, Tim Satgasus P3TPK Kejagung RI, dan KPK terkait rencana pelimpahan kasus tersebut.
    - Hasil Koordinasi : telah dilaksanakan rapat koordinasi antara direktorat penyelidikan KPK, Tim Satgasus P3TPK Kejagung RI, dan KPK pada 28 Juni 2018 dengan 5 (lima) kesimpulan.
171. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan keterangan BPK RI terkait Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangannya pada kegiatan pengambilan keterangan Ahli oleh Penyidik Kejati DKI Jakarta tanggal 9 Juli 2018 di Kantor BPK RI.
172. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat tembok pantai Desa Ongkaw pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan data pasang surut perairan Laut Sulawesi di daerah Desa Ongkaw Kec. Sinon Sayang Minahasa Selatan bersama Kejari Minahasa Selatan dan Badan Informasi Geospasial pada 18-20 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Fasilitasi pengambilan data pasang surut perairan Laut Sulawesi di daerah Desa Ongkaw Kec. Sinon Sayang Minahasa Selatan telah dilaksanakan, seluruh data terkait akan menjadi laporan Ahli BIG dalam penguatan unsur perkara *a quo*.
173. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 25-26 Januari 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
174. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 25-26 Januari 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
175. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBD TA 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.673.211.000 serta Pengadaan Alat Keehatan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBN TA 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.826.672.000 dengan terpidana atas nama DADANG PRIJATNA, SH dan atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA yang disidangkan oleh Kejari Kab. Tangerang.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi lelang tanah sebagai uang pengganti kerugian negara pada 24 Juli 2018 di Kantor KPKNL Kota Serang.
    - Hasil Koordinasi: KPKNL Kotra Serang akan membantu membuat penilaian atas tanah dimaksud sehubungan dengan telah habisnya masa berlaku hasil penilaian atas tanah yang sebelumnya dibuat oleh KJPP Areyanti sebagai salah satu kelengkapan administrasi lelang.
176. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemantauan persidangan atas nama terdakwa CHRISTIANO Y.A.A.B WEENAS, S.H; STEPHEN YANI POLUAKAN, S.T dan HANDRIE M.J. KOMALING, S.H dengan agenda sidang pembacaan dakwaan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Manado
    - Hasil Koordinasi: Persidangan telah dinyatakan dibuka oleh Majelis Hakim. Dalam persidangan para tersangka menyampaikan keberatan terkait panggilan sidang yang terlalu mendadak, belum diterimanya surat dakwaan oleh tersangka dan para tersangka belum menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi dalam persidangan,atas penyampaian keberatan dimaksud Majelis Hakim menetapkan sidang dengan agenda pembacaan dakwaan akan dilanjutkan pada Hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018.
177. Dugaan TPK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Padang.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi pemeriksaan saksi untuk Kepolisian Resor Kota Padang.
    - Hasil Koordinasi: 4 (empat) orang saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik Polresta Padang guna kepentingan penyidikan perkara *a quo*.
178. Dugaan TPK Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer K-II Menjadi CPNS Kabupaten Dompu Formasi Tahun 2013/2014 T.A 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda NTB.
    - Kegiatan Koordinasi: Gelar perkara bersama dengan Kepolisian Daerah NTB, Pimpinan KPK, Penyelidik KPK, Penyidik KPK dan JPU KPK terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer K-II Menjadi CPNS Kabupaten Dompu Formasi Tahun 2013/2014 T.A 2015.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan Gelar Perkara bersama dengan keputusan bahwa perkara *a quo* akan dipelajari terlebih dahulu dan Pimpinan KPK akan melakukan diskusi terlebih dahulu untuk menentukan langkah selanjutnya.
179. Dugaan TPK Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya TA 2014 di Kementrian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBN TA 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Dharmasraya.
    - Kegiatan Koordinasi: koordinasi fasilistasi Polres Dharmasraya dalam Pengambilan Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Polres Dharmasraya tanggal 29 Juli 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
180. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Gorontalo.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 3 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
181. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 4 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
182. Dugaan TPK Pembangunan Turap/*Sheet Pile* di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara TA 2010-2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Persiapan dan perencanaan pembiayaan pemeriksaan fisik tambahan terhadap pekerjaan Turap/ *Sheet Pile*.
    - Hasil koordinasi: Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan menghasilkan kesepakatan terkait persiapan dan perencanaan pembiayaan pemeriksaan fisik tambahan terhadap pekerjaan Turap/ *Sheet Pile* pada 20 Juli 2018.
183. Dugaan TPK terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak dengan menggunakan Anggaran APBN-P Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas II TanjungPinang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres TanjungPinang.
    - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan Ahli Geospasial dari Badan Informasi Geospasial pada 9 Juli 2018 di Kantor Badan Informasi Gesopasial, Bogor.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Geospasial telah memberikan keterangan sebagai Ahli ditingkat penyidikan pada 9 Juli 2018.
184. Dugaan TPK dan dugaan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atas penyalahgunaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada Pemerintah Kota Batam yang ditempatkan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) yang disidik dan dilakukan penuntutan oleh Kejati Kepulauan Riau.
    - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan Ahli Keuangan Negara dan Ahli Hukum Pidana ditingkat persidangan pada 30 Juli 2018 di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri TanjungPinang.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Keuangan Negara dan Ahli Hukum Pidana telah memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan

Negeri TanjungPinang tanggal 30 Juli 2018.

185. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2015-2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Bojonegoro.
    - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan Ahli Hukum Pidana, Ahli Administrasi Negara dan Ahli Keuangan Negara ditingkat Penyidikan.
    - Hasil koordinasi: Ahli Hukum Pidana, Ahli Administrasi Negara telah memberikan keterangan sebagai Ahli pada 25 Juli 2018 dan Ahli Keuangan Negara telah memberikan keterangannya sebagai Ahli pada 26 Juli 2018.
186. Dugaan TPK Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan Nilai Kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulsel.
    - Kegiatan Koordinasi: Dilaksanakan kegiatan cek fisik ke Palopo, Makassar bersama dengan Tim Ahli Teknis ITB dan Auditor BPK RI pada 11-15 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Hasil kegiatan sudah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
187. Dugaan TPK Penyimpangan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeleu Tahun 2002-2012 pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeleu yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Aceh.
    - Kegiatan Koordinasi: Dilaksanakan kegiatan fasilitasi pemeriksaan Ahli Hukum Administrasi Negara ke Univ. Atma Jaya Yogyakarta pada 29-31 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Hasil kegiatan sudah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
188. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi penyidik Kejari Palembang pada kegiatan pemeriksaan fisik lift yang dilaksanakan tanggal 2-4 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli teknis telah melaksanakan pemeriksaan fisik lift yang hasilnya telah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
189. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/ lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Kejari Palembang pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Teknis yang dilaksanakan tanggal 11 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknis telah memberikan pendapat dalam BAP.
190. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 atas nama tersangka PW yang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka PW.
191. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 atas nama tersangka ARL yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka ARL.
192. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang diduga dilakukan oleh Korporasi yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka korporasi.
193. Dugaan TPK pada penjualan minyak mentah milik Pertamina RU-III dari MT Andhika Arsanti ke MT Merlion Dua sebanyak kurang lebih 500 KL yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumsel.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Polda Sumsel pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Keuangan Negara yang dilaksanakan tanggal 31 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Keuangan Negara telah memberikan pendapat dalam BAP.

194. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Aparat Penegak Hukum terkait penanganan perkara pidana umum di Pengadilan Negeri Rengat dan/ atau Pengadilan Negeri Kuantan Singingi tahun 2018 yang penyelidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi penyidik Bareskrim Polri dalam permintaan keterangan tahap penyelidikan.
    - Hasil Koordinasi: Penyidik Bareskrim telah melakukan permintaan keterangan terhadap 4 (empat) orang. Keterangan yang didapatkan sangat mendukung kegiatan penyelidikan kasus tersebut.
195. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK atas nama tersangka ARL Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Teknik Geologi yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknik Geologi telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka ARL.
196. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang diduga dilakukan oleh Korporasi yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Teknik Geologi yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknik Geologi telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka Korporasi.
197. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK atas nama tersangka ARL Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Teknik Perminyakan yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknik Perminyakan telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka ARL.
198. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang diduga dilakukan oleh Korporasi yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Teknik Perminyakan yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknik Perminyakan telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka Korporasi.
199. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Aparat Penegak Hukum terkait penanganan perkara pidana umum di Pengadilan Negeri Rengat dan/atau Pengadilan Negeri Kuantan Singingi tahun 2018 yang penyelidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi antara direktorat penyelidikan KPK, Penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan KPK terkait rencana permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang berdomisili di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara.
    - Hasil Koordinasi: telah dilaksanakan rapat koordinasi antara direktorat penyelidikan KPK, Penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri, dan KPK pada 20 Juli 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan.
200. Koordinasi terkait data informasi 269 (dua ratus enam puluh sembilan) SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK yang dilaksanakan penyidikan nya oleh Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI tahun 2015 sampai dengan 2017.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi (R/206/KOR.03/20-25/01/2018 tanggal 24 Januari 2018).
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi 269 (dua ratus enam puluh sembilan) perkembangan penanganan Perkara TPK yang dilaksanakan penyidikan nya oleh Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI tahun 2015 sampai dengan 2017.
201. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat tembok pantai Desa Ongkaw pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi rapat koordinasi laporan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Badan Informasi Geospasial pada 10 Juli 2018 di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan kondisi ketinggian jalan dan tanah disekitar pemukiman seperti yang terukur menunjukkan bahwa pada saat pasang paling tinggi selama siklus pasang surut 18.6 tahun air laut tidak akan sampai ke pemukiman warga.

202. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBD TA 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.673.211.000 serta Pengadaan Alat Keehatan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bersumber dari APBN TA 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.826.672.000 dengan terpidana atas nama DADANG PRIJATNA, SH dan atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA yang disidangkan oleh Kejari Kab. Tangerang.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan lapangan oleh KPKNL Kota Serang dan pengambilan laporan penilaian (appraisal) atas tanah yang beralamat di Jl. Raya Jakarta KM 4 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Banten pada 13 Juli 2018.
    - Hasil Koordinasi: Kejaksaan Negeri Kab. Tangerang akan segera melaporkan hasil penilaian dari KPKNL Kotra Serang kepada Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejagung RI untuk selanjutnya meminta izin menindaklanjuti dengan mekanisme pelelangan.
203. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Pemeriksa Pajak terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Cengkareng Jakarta Barat untuk Tahun Pajak 2016 yang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi terkait rencana pelimpahan penanganan perkara pada 14 Agustus 2018 di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: Penyerahan dokumen dan barang bukti terkait kasus tersebut yang saat ini dikuasai oleh IBI KMK RI dan KPK RI akan diserahkan kepada Jampidsus Kejaksaan RI di Kantor Kejagung RI setelah Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan surat penyerahan dokumen dan barang bukti kasus *a quo* kepada Jaksa Agung RI cq Jampidsus Kejaksaan RI dengan tembusan kepada Pimpinan KPK RI.
204. Dugaan TPK dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi Jakarta periode 2011-2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi kegiatan klarifikasi dalam rangka Audit PKKN oleh BPKP Prov. DKI Jakarta pada 7-9 Agustus 2018 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
    - Hasil Koordinasi: Pemeriksaan terhadap Tim Internal Audit Bank Jatim atas nama Eko Tri Prasetyo, Sulam Andjar Rochim dan Aryono Prasodo telah dilaksanakan. Penyidik Kejati DKI Jakarta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Tim BPKP Prov. DKI Jakarta terkait rencana kegiatan klarifikasi lanjutan terhadap pegawai Bank Jatim Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi.
205. Dugaan TPK pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB di RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kendal.
    - Kegiatan Koordinasi: Gelar Perkara kedua bersama dengan Penyidik perkara *a quo* dan KPK.
    - Hasil Koordinasi: KPK melalui KPK akan melakukan fasilitasi pemeriksaan saksi, fasilitasi pemeriksaan Ahli, dan apabila diperlukan akan melakukan fasilitasi computer forensic. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Agustus 2018 dan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
206. Dugaan TPK pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB di RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kendal.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan saksi di Ruang Pemeriksaan Gedung KPK RI dan pemeriksaan saksi yang merupakan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilakukan pemeriksaan saksi terkait perkara *a quo* di Gedung KPK RI dan Lembaga Pemasyarakatan Tangerang dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Kegiatan dilaksanakan pada 14 Agustus 2018 dan 16 Agustus 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
207. Dugaan TPK pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB di RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kendal.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dari LKPP.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara Sumpah dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kejari Kendal tanggal 15 Agustus 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
208. Dugaan TPK Pembangunan Turap/*Sheet Pile* di Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara TA 2010-2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi penyidik Bareskrim Polri dalam melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan turap/*Sheet Pile* dengan bantuan ahli konstruksi.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi pada 5-11 Agustus 2018 dan diperoleh Berita Acara Pendampingan Pemeriksaan Fisik dari penyidik Bareskrim Polri.
209. Dugaan TPK yang diduga dilakukan oleh Tersangka Ahmad Teguh dkk, dalam proyek pembangunan MCK Komunal dalam Program Sanimas di Wilayah Kota Bogor Tahun Anggaran 2013 yang ditangani oleh Polres Bogor Kota.
    - Kegiatan Koordinasi: Gelar Perkara Bersama
    - Pelaksanaan Koordinasi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Bogor Kota, Bareskrim Polri serta KPK pada 14 Agustus 2018, dengan 5 (lima) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
210. Dugaan TPK dalam hal putus kontrak akibat kesalahan Penyedia Jasa PT. Uno Tanoh Suramo (PT. UTS) yang mana Jaminan Pelaksanaan tidak dicairkan berkaitan dengan Proyek Pekerjaan Pembangunan Lift Gedung Sekretariat Kota Bogor Tahun Anggaran 2013, sehingga Pemerintah Kota Bogor mengalami kekurangan pendapatan/kerugian Daerah sebesar Rp 259.386.150 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bogor Kota.
    - Kegiatan Koordinasi: Gelar Perkara Bersama
    - Pelaksanaan Koordinasi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Bogor Kota, Bareskrim Polri serta KPK pada 14 Agustus 2018, dengan 8 (delapan) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
211. Dugaan TPK dalam penyalahgunaan dana pembebasan tanah untuk Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Cimahi.
    - Kegiatan Koordinasi: Gelar Perkara Bersama
    - Pelaksanaan Koordinasi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Cimahi, Bareskrim Polri serta KPK pada 15 Agustus 2018, dengan 4 (empat) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
212. Dugaan TPK terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak dengan menggunakan Anggaran APBN-P Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas II TanjungPinang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres TanjungPinang.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan Ahli Teknik Sipil Kelautan pada 20 Agustus 2018 di Gedung Merah Putih, KPK.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Teknik Sipil Kelautan telah memberikan keterangan sebagai Ahli ditingkat penyidikan pada 20 Agustus 2018.
213. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2015-2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Bojonegoro.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Gelar Perkara bersama BPK RI di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur pada 31 Agustus 2018.
    - Pelaksanaan Koordinasi: Gelar perkara telah dilaksanakan bersama penyidik Kejari Bojonegoro dan BPK RI di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur pada 31 Agustus 2018.
214. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Polda Bengkulu pada 14-17 Agustus 2018
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: laporan data dan informasi perkembangan penanganan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
215. Koordinasi terkait informasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Kejati Bengkulu pada 14-17 Agustus 2018.
    - Kegiatan Koordinasi: Pengumpulan data penanganan perkara TPK untuk keperluan *database*/pemutakhiran data.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan perkara TPK. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
216. Dugaan TPK pada Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I TA 2015 dan Tahap II TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi bersama Auditor pada BPK RI, Penyidik Kejati Maluku, dan Ahli Teknis pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018.
    - Pelaksanaan Koordinasi: Telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Penyidik Kejati Maluku, Auditor pada BPK RI, Ahli Teknis, serta KPK, dengan 8 (delapan) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
217. Dugaan TPK Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan Nilai Kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulsel.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi bersama Auditor pada BPK RI dan Penyidik Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.

- Pelaksanaan Koordinasi: Telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Penyidik Polda Sulsel, Auditor pada BPK RI serta KPK, dengan 7 (tujuh) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi. Akan dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi lanjutan dengan Auditor BPK RI, Penyidik Polda Sulsel, dan Ahli Teknis ITB pada 6 September 2018.

218. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Korporasi yang ditangani oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Keuangan Negara yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Keuangan Negara telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka Korporasi.
219. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 atas nama tersangka ARL yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim pada kegiatan permintaan pendapat Ahli Keuangan Negara yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2018.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Keuangan Negara telah memberikan pendapat dalam BAP untuk tersangka ARL.
220. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas nama tersangka MT yang ditangani oleh Polda Sumsel.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Polda Sumsel dalam pencarian dan penangkapan DPO.
    - Hasil Koordinasi: DPO atas nama tersangka MT telah berhasil ditangkap dan telah ditahan oleh Penyidik Polda Sumsel.
221. Dugaan TPK dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi Jakarta periode 2011-2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi kegiatan klarifikasi dalam rangka Audit PKKN oleh BPKP Prov. DKI Jakarta pada 29-30 Agustus 2018 di Kantor BPKP Perwakilan DKI Jakarta.
    - Hasil Koordinasi: Ahli perhitungan kerugian Keuangan Negara telah melaksanakan prosedur klarifikasi saksi dan tersangka dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Menurut Ahli dari BPKP diperlukan pendalaman terhadap fakta atas pertemuan-pertemuan antara para pihak dalam perkara *a quo*. Penyidik Kejati DKI Jakarta selanjutnya perlu melakukan pemeriksaan kepada para debitur KUR.
222. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 5 September 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
223. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 6 September 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
224. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 19 September 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
225. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 20 September 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
226. Dugaan TPK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya

dilaksanakan oleh Polresta Padang.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Polresta Padang untuk melakukan pemeriksaan saksi.
    - Hasil Koordinasi: Penyidik Polresta Padang telah mengambil keterangan saksi sebanyak 9 (sembilan) orang pada 3-7 September 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
227. Dugaan TPK dalam hal tidak melakukan pencatatan putusan dan atau penetapan Pengadilan Negeri Padang pada peta pendaftaran dan atau warkah sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Padang, sehingga terjadinya penerbitan sertifikat, peralihan hak dan adanya pembebanan hak tanggungan untuk agunan kredit di bank pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap tanah pada objek putusan dan atau penetapan pengadilan dimaksud yang terjadi sejak tahun 1982 sampai 2017 di Kantor Pertanahan Kota Padang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pengambilan keterangan Ahli Keuangan Negara.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Keuangan Negara telah memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada 28 September 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
228. Dugaan TPK Pengadaan Mesin Boat BF 250 Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Banggai Laut yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Banggai Laut.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut untuk melakukan pemeriksaan saksi yang merupakan tahanan KPK.
    - Hasil Koordinasi: Saksi telah diambil keterangannya oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut pada 27-28 September 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
229. Dugaan TPK Penyalahgunaan atas Terbitnya Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) TA 2009 atas nama ZAENUL ERFAN, SS yang dilakukan oleh Prof. H. A. FAHMY ARIEF, MA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi gelar perkara antara Penyidik Polda Kalimantan Selatan dengan jajaran Irjen Kementerian Agama RI.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan kegiatan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Selatan, Koorsup KPK, dan jajaran Irjen Kementerian Agama RI pada 3 September 2018.
230. Dugaan TPK Penyimpangan pada Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan fasilitas umum lainnya di Wilayah Provinsi Gorontalo yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Gorontalo.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada hari Rabu, 18 September 2018.
231. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum KM. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Balikpapan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada hari Rabu, 19 September 2018.
232. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum KM. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Balikpapan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada hari Rabu, 19 September 2018.
233. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka CC.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
234. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka CC.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
235. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.

- Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka CC.
- Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.

236. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka MY.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
237. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka MY.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
238. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka MY.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
239. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka N.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
240. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka N.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
241. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka N.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
242. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka RPM.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
243. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka RPM.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
244. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka RPM.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
245. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka RUSDIANA
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.

246. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka RUSDIANA
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
247. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka AK.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
248. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka AK.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
249. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka SELAMAT
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
250. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka SELAMAT
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 20 September 2018.
251. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka HA.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada hari Jumat, 21 September 2018.
252. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Administrasi Negara atas nama tersangka HA.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada hari Jumat, 21 September 2018.
253. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka AW.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada 27 September 2018.
254. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2015-2017 yang disidik oleh Kejari Bojonegoro.
    - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan Ahli dari Kemenkeu ditingkat Penyidikan.
    - Hasil koordinasi: Ahli dari Kemenkeu telah memberikan keterangannya sebagai Ahli pada 25 September 2018.
255. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2015-2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Bojonegoro.
    - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan Ahli dari Kemendagri ditingkat Penyidikan.
    - Hasil koordinasi: Ahli dari Kemendagri telah memberikan keterangannya sebagai Ahli pada 26 September 2018.
256. Dugaan TPK pada kegiatan pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Kerinci TA 2010-2014 diatas lahan yang tidak terdapat hak diatasnya yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Jambi
    - Kegiatan koordinasi: Koordinasi dengan Ahli Mekanikal Tanah dari ITB terkait

terkait rencana penelitian dan pengujian di lokasi perkantoran Kab. Kerinci, Jambi di Kampus ITB, Bandung.
- Hasil koordinasi: Kegiatan koordinasi telah dilakukan bersama dengan Ahli Geoteknik dari ITB pada 26 September di Kampus ITB, Bandung.

257. Dugaan TPK Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan Nilai Kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulsel.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fisik bersama Ahli Teknis ITB, Auditor pada BPK RI dan Penyidik Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 6 September 2018.
    - Pelaksanaan Koordinasi: Telah dilaksanakan rapat koordinasi antara tindak lanjut hasil pemeriksaan fisik bersama Ahli Teknis ITB, Penyidik Polda Sulsel, Auditor pada BPK RI serta KPK, dengan 8 (delapan) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
258. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejati Aceh.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan saksi (lanjutan) di Ruang Riksa Gedung Merah Putih KPK pada 17 September 2018
    - Pelaksanaan Koordinasi: Hasil kegiatan sudah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
259. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejati Aceh.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan saksi (lanjutan) di Ruang Riksa Kejati Jawa Barat pada 19 September 2018
    - Pelaksanaan Koordinasi: Hasil kegiatan sudah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
260. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejati Aceh.
    - Kegiatan Koordinasi: Dilaksanakan kegiatan pengambilan keterangan Ahli Struktur Bangunan (lanjutan) di Ruang Rapat FTSLK ITS pada 20 September 2018
    - Pelaksanaan Koordinasi: Hasil kegiatan sudah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
261. Dugaan TPK Pelaksanaan Program IP4T Tahun 2014 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: koordinasi dengan Ahli Hukum Agraria terkait rencana fasilitasi memfasilitasi penyidik Kejari Kotawaringin Timur pada kegiatan permintaan pendapat ahli teknis.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Hukum Agraria bersedia memberikan pendapat di tahap penyidikan dan penuntutan.
262. Dugaan TPK Pelaksanaan Program IP4T Tahun 2014 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: koordinasi dengan Ahli Hukum Administrasi Negara terkait rencana fasilitasi memfasilitasi penyidik Kejari Kotawaringin Timur pada kegiatan permintaan pendapat ahli teknis.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Hukum Administrasi Negara bersedia memberikan pendapat di tahap penyidikan dan penuntutan.
263. Dugaan TPK Pengadaan Kapal Patroli pada KPLP di Kementerian Perhubungan RI TA 2013 dan 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat Koordinasi dengan Penyidik Bareskrim Polri dan BPK RI pada 10 Oktober 2018 di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: Simpulan dan rekomendasi rapat koordinasi. Ahli BPK RI memerlukan klarifikasi dari Ahli PT. BKI terkait perhitungan kerugian keuangan negara. Akan dilakukan pertemuan lanjutan antara Penyidik Bareskrim Polri, BPK RI, dan PT. BKI selaku Ahli Teknis.
264. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi dengan Ahli ITS pada 11 Oktober 2018 di Kampus ITS, Surabaya.
    - Hasil Koordinasi: Akan dilakukan pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian di persidangan perkara *a quo* dan akan mengundang Ahli ITS untuk ikut melakukan pemeriksaan setempat.
265. Dugaan TPK Pengadaan Kapal Patroli pada KPLP di Kementerian Perhubungan RI TA 2013 dan 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat Koordinasi dengan Penyidik Bareskrim Polri dan BPK RI pada 17 Oktober 2018 di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: Simpulan dan rekomendasi rapat koordinasi. Akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kapal yang dibuat oleh 6 (enam) galangan kapal dan Penyidik Bareskrim Polri akan mencari dan memberikan dokumen tambahan terkait rancangan kapal untuk menambah referensi pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli teknis dari PT. BKI dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
266. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 24 Oktober 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
267. Koordinasi terkait data informasi SPDP dan perkembangan penanganan perkara TPK dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data perkembangan penanganan perkara TPK untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 25 Oktober 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
268. Dugaan TPK adanya dugaan permintaan sejumlah uang dari oknum anggota Dewan terhadap Dana Bantuan Rehabilitasi bagi SD dan SMP di Kota Mataram yang terkena musibah gempa bumi Tahun Anggaran Perubahan 2018 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Mataram.
    - Kegiatan Koordinasi: Perekaman persidangan atas nama terdakwa H. MUHIR, S. Kep di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram. Agenda persidangan dimaksud adalah pemeriksaan Saksi dari Jaksa Penuntut Umum.
    - Hasil Koordinasi: Perekaman Sidang akan terus dilaksanakan sampai dengan sidang dengan agenda pembacaan putusan dengan dibantu oleh Tim Perekaman Sidang dari Universitas Mataram.
269. Dugaan TPK pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya TA 2014 di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat yang bersumber dari dana APBN TA 2014 dengan total anggaran sebesar Rp11.122.970.000 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Dharmasraya.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya dalam pengambilan keterangan Ahli Akuntansi dan Auditing BPK RI.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya tanggal 3 Oktober 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
270. Dugaan TPK Pengadaan Mesin Boat BF 250 Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Banggai Laut yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Banggai Laut.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut dalam pengambilan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa pada LKPP.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut tanggal 30 Oktober 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
271. Dugaan TPK Pengadaan Mesin Boat BF 250 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Banggai Laut yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Banggai Laut.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut dalam penelusuran aset (*asset tracing*) Tersangka.
    - Hasil Koordinasi: Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan KPK telah berkoordinasi dengan Unit Labuksi untuk menelusuri aset Tersangka.
272. Dugaan TPK Pengadaan Mesin Boat BF 250 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Banggai Laut yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Banggai Laut.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut dalam pengambilan keterangan Ahli Pidana.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut tanggal 31 Oktober 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
273. Dugaan TPK Pengadaan Mesin Boat BF 250 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Banggai Laut yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Banggai Laut.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Kejaksaan Negeri Banggai Laut untuk melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka yang merupakan tahanan KPK.
    - Hasil Koordinasi: Saksi dan Tersangka telah diambil keterangannya oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut guna kepentingan penyidikan perkara *a quo*. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
274. Dugaan TPK Alih Fungsi Lahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai pada Lokasi

Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Bandung TA 2015 atas nama Terdakwa I Wayan Rubah, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali.
- Kegiatan yang dikoordinasikan: Fasilitasi Penuntut Umum Kejati Bali untuk menghadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara terkait persidangan perkara tersebut.
- Hasil koordinasi: Ahli Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar pada 23 Oktober 2018.

275. Dugaan TPK Alih Fungsi Lahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai pada Lokasi Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Bandung TA 2015 atas nama Terdakwa I Wayan Rubah, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali.
    - Kegiatan yang dikoordinasikan: Fasilitasi Penuntut Umum Kejati Bali untuk menghadirkan Ahli Hukum Pertanahan terkait persidangan perkara tersebut.
    - Hasil koordinasi: Ahli Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar pada 23 Oktober 2018.
276. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan Polda Jambi.
    - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi pemeriksaan Ahli di Persidangan dari Ahli Teknis ITB, Ahli LKPP dan Ahli dari BPK.
    - Hasil koordinasi: Ahli Teknis ITB, Ahli LKPP dan Ahli dari BPK telah memberikan keterangannya sebagai Ahli dipersidangan pada 10 Oktober 2018.
277. Dugaan TPK pada kegiatan pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Kerinci TA 2010-2014 diatas lahan yang tidak terdapat hak diatasnya yang disidik oleh Kejati Jambi
    - Kegiatan koordinasi: Koordinasi survei awal dengan Ahli Mekanikal Tanah dari ITB terkait terkait rencana penelitian dan pengujian di lokasi perkantoran Kab. Kerinci, Jambi di Kerinci.
    - Hasil koordinasi: Kegiatan koordinasi telah dilakukan bersama dengan Ahli Geoteknik dari ITB dan Kejati pada 24-26 Oktober 2018 di Kerinci, Jambi.
278. Dugaan TPK pada Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I TA 2015 dan Tahap II TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi bersama dan Ahli Teknis pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018.
    - Pelaksanaan Koordinasi: Telah dilaksanakan rapat koordinasi antara KPK dengan Ahli Teknis, dengan 8 (delapan) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi. Selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan Pemeriksaan Fisik dengan Ahli Teknis dari Politeknik Negeri Bandung, Penyidik Kejati Maluku, dan Auditor pada BPK RI.
279. Dugaan TPK Pelaksanaan Program IP4T Tahun 2014 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Ahli Hukum Agraria dalam persidangan terdakwa JAMALUDDIN tanggal 11 Oktober 2018 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Hukum Agraria telah memberikan keterangan pada persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 Oktober 2018.
280. Dugaan TPK Pelaksanaan Program IP4T Tahun 2014 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditangani oleh Kejari Kotawaringin Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Ahli Hukum Administrasi Negara dalam persidangan terdakwa JAMALUDDIN tanggal 11 Oktober 2018 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 Oktober 2018.
281. Dugaan TPK Program PNPM-Mpd dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pinduhurani Kec. Tabundung Kabupaten Sumba Timur NTT TA 2011 atas nama tersangka ARRON RIWONG alias AKIANG yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Sumba Timur.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pengambilan keterangan Ahli dari LKPP pada 09 November 2018 di Polres Sumba Timur.
    - Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangannya pada kegiatan pengambilan keterangan Ahli oleh Penyidik Polres Sumba Timur tanggal 09 November 2018 di Polres Sumba Timur dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
282. Dugaan TPK dalam Proyek Pemecah Ombak/ Penimbunan Pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016 atas nama Terdakwa Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME yang disidangkan oleh JPU Kejati Sulawesi Utara.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi fasilitasi pencarian Terdakwa atas nama Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, ME pada 14 November 2018 Di Gedung Merah Putih KPK.
    - Hasil Koordinasi: Simpulan dan rekomendasi rapat koordinasi yang pada intinya KPK akan memberikan dukungan dan memberikan fasilitasi pencarian Terdakwa dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
283. Dugaan TPK dalam pelaksanaan program Bantuan Sosisal Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi TA 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang ditujukan kepada Koperasi Wanita Saroha untuk pembangunan Pasar Tradisional di Dsn. Gunung Tua dan Baringin Desa Situmba Kec. Sipirok Kab. Tapsel dengan nilai bantuan sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) sumbar dana APBN TA 2014 atas nama Terdakwa NURHAYATI, S.Pd alias NURHAYATI HASIBUAN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Tapanuli Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pendampingan Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada 22 November 2018 di persidangan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.
    - Hasil Koordinasi: Pendampingan pemeriksaan Ahli Hukum Pidana di persidangan telah selesai dilaksanakan dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan dengan Nota Dinas.
284. Dugaan TPK dalam Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun Anggaran 2016 atas nama Terdakwa HANDRIE M.J. KOMALING, S.H yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pendampingan Ahli dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 29 November 2018 di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado.
    - Hasil Koordinasi: Pendampingan pemeriksaan Ahli dari Badan Informasi Geospasial (BIG) di persidangan telah selesai dilaksanakan dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan dengan Nota Dinas.
285. Dugaan TPK dalam Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun Anggaran 2016 atas nama Terdakwa HANDRIE M.J. KOMALING, S.H yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pendampingan Ahli dari Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (FTK-ITS) pada 29 November 2018 di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado.
    - Hasil Koordinasi: Pendampingan pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (FTK-ITS) di persidangan telah selesai dilaksanakan dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan dengan Nota Dinas.
286. Dugaan TPK dalam Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun Anggaran 2016 atas nama Terdakwa STEPHEN YANI POLUAKAN, S.T yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pendampingan Ahli dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 29 November 2018 di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado.
    - Hasil Koordinasi: Pendampingan pemeriksaan Ahli dari Badan Informasi Geospasial (BIG) di persidangan telah selesai dilaksanakan dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan dengan Nota Dinas.
287. Dugaan TPK dalam Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun anggaran 2016 atas nama Terdakwa STEPHEN YANI POLUAKAN, S.T yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pendampingan Ahli dari Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (FTK-ITS) pada 29 November 2018 di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado.
    - Hasil Koordinasi: Pendampingan pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (FTK-ITS) di persidangan telah selesai dilaksanakan dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan dengan Nota Dinas.
288. Dugaan TPK dalam Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan

Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun Anggaran 2016 atas nama Terdakwa CHRISTIANO Y.A.A.B WEENAS, S.H yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.

- Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pendampingan Ahli dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 29 November 2018 di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado.
- Hasil Koordinasi: Pendampingan pemeriksaan Ahli dari Badan Informasi Geospasial (BIG) di persidangan telah selesai dilaksanakan dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan dengan Nota Dinas.

289. Dugaan TPK dalam Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun Anggaran 2016 atas nama Terdakwa CHRISTIANO Y.A.A.B WEENAS, S.H yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi pendampingan Ahli dari Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (FTK-ITS) pada 29 November 2018 di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado.
    - Hasil Koordinasi: Pendampingan pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (FTK-ITS) di persidangan telah selesai dilaksanakan dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan dengan Nota Dinas.
290. Dugaan TPK uang setoran Kas Daerah Kota Semarang pada Rekening Giro atas nama Wali Kota Cq Kas Umum Daerah pada Bank BTPN Cab. Semarang yang terjadi sejak tahun 2008-tahun 2014 di Kantor UPTD Kasda Pemkot Semarang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi gelar perkara dengan Jaksa Peneliti Berkas Perkara.
    - Pelaksanaan Koordinasi: Simpulan dan Rekomendasi Ekspose tanggal 12 November 2018. Kegiatan telah dilaporakan ke Deputi Bidang Penindakan.
291. Dugaan TPK Pungli Perhutani KPH Kendal yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi pengambilan BAP Ahli Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
    - Hasil Koordinasi: Ahli Hukum Pidana telah diambil keterangannya. Kegiatan telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan.
292. Dugaan TPK Pengadaan Mesin Boat BF 250 Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Banggai Laut yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Banggai Laut.
    - Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Kejaksaan Negeri Banggai Laut untuk melakukan pemeriksaan tersangka atas nama ZAINAL MUS yang merupakan tahanan KPK.
    - Hasil Koordinasi: Tersangka ZAINAL MUS telah diambil keterangannya oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut guna kepentingan penyidikan perkara *a quo*. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.
293. Dugaan TPK Pengadaan Mesin Boat BF 250 Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Banggai Laut yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Banggai Laut.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan BPK RI terkait penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mesin Boat BF 250 Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Banggai Laut.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan BPK RI. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
294. Dugaan TPK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Padang.
    - Kegiatan Koordinasi: Rapat koordinasi dengan Penyidik Polresta Padang dan BPK RI terkait audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Dokter dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang Tahun Anggaran 2013.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Penyidik Polresta Padang dan BPK RI dengan 9 (sembilan) simpulan dan rekomendasi. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
295. Koordinasi terkait pemutakhiran data SPDP dan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat beserta jajaran.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data SPDP dan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 27 November 2018.

    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara tindak pidana korupsi. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
296. Koordinasi terkait pemutakhiran data SPDP dan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat beserta jajaran.
    - Kegiatan Koordinasi: Pemutakhiran data SPDP dan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk keperluan *database* dan bahan Supervisi pada 28 November 2018.
    - Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara tindak pidana korupsi. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
297. Dugaan TPK Alih Fungsi Lahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai pada Lokasi Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Bandung TA 2015 atas nama Terdakwa I Wayan Rubah yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali.
    - Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penuntut Umum Kejati Bali untuk menghadirkan Ahli Hukum Pidana terkait persidangan perkara tersebut.
    - Hasil koordinasi: Ahli Hukum Pidana telah memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar pada 13 November 2018.
298. Dugaan TPK berupa penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada program kegiatan Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung Bukit Suligi Blok A seluas 250 Ha. APBN TA 2010 sebesar Rp780.960.000, atas nama tersangka Y dan J yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Rokan Hulu.
    - Kegiatan Koordinasi: Gelar Perkara
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Rokan Hulu, Penyidik Polda Riau, Jaksa Peneliti pada Kejari Rokan Hulu, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Riau, Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Riau, dan Ahli Tekhnis dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta KPK pada 8 November 2018 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
299. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB, serta Kendaraan Khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013 atas nama tersangka IMN yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali.
    - Kegiatan Koordinasi: Gelar Perkara
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Bali dan KPK pada 1 November 2018 dengan 5 (lima) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
300. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB, serta Kendaraan Khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013 atas nama tersangka IKB yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali.
    - Kegaiatan Koordinasi: Gelar Perkara
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Bali dan KPK pada 1 November 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi
301. Dugaan TPK penyimpangan/penyelewengan Keuangan Negara pada pengelolaan Keuangan Daerah (Deposito) Kabupaten Muna Tahun 2014-2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Muna.
    - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi rapat koordinasi berupa gelar perkara antara Penyidik pada Kejari Muna dengan KPK RI, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kejati Sulawesi Tenggara terkait kendala yang dialami dalam proses penyidikan.
    - Hasil koordinasi: Simpulan dan rekomendasi rapat koordinasi hasil gelar perkara.
302. Dugaan TPK penyimpangan/penyelewengan Keuangan Negara pada pembayaran dana kegiatan proyek/pekerjaan yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Muna TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Muna.
    - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi rapat koordinasi berupa gelar perkara antara Penyidik pada Kejari Muna dengan KPK RI, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kejati Sulawesi Tenggara terkait kendala yang dialami dalam proses penyidikan.
    - Hasil koordinasi: Simpulan dan rekomendasi rapat koordinasi hasil gelar perkara.
303. Dugaan TPK penyimpangan/penyelewengan Keuangan Negara terhadap kegiatan penampung air dan perpipaan air bersih di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Muna.
    - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi rapat koordinasi berupa gelar perkara antara Penyidik pada Kejari Muna dengan KPK RI, Kejati Sulawesi Tenggara dan Inspektorat Kabupaten Muna terkait kendala yang dialami dalam proses penyidikan.
    - Hasil koordinasi: Simpulan dan rekomendasi rapat koordinasi hasil gelar perkara.
304. Dugaan TPK dalam pekerjaan Jalan Jambi-Sukaramai sumber anggaran APBD Kabupaten Ketapang TA 2010 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Ketapang.
    - Kegiatan koordinasi: Fasilitasi rapat

koordinasi berupa gelar perkara bersama antara Penyidik pada Polres Ketapang dengan KPK RI, Bareskrim Polri, BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, Kejati Kalimantan Barat dan Kejari Ketapang.
- Hasil koordinasi: Simpulan dan rekomendasi rapat koordinasi hasil gelar perkara bersama.

305. Dugaan TPK pada kegiatan pengadaan tanah dan pembangunan kompleks perkantoran Pemkab Kerinci di Bukit Tengah Tahun 2010-2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik pada Kejati Jambi.
- Kegiatan Koordinasi: Melakukan kegiatan Koordinasi Cek Fisik di Komplek Perkantoran Pemkab Kerinci di Kerinci, Jambi bersama Penyidik Kejati Jambi dan Ahli Mekanika Tanad dari ITB pada 21-30 November 2018.
- Hasil Koordinasi: Kegiatan Cek fisik telah dilakukan dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.

306. Dugaan TPK pada Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I TA 2015 dan Tahap II TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.
- Kegiatan Koordinasi: Pelaksanaan kegiatan cek fisik.
- Pelaksanaan Koordinasi: Telah dilaksanakan kegiatan cek fisik dengan Ahli Teknis, Politeknik Negeri Bandung, Penyidik Kejati Maluku, dan Auditor pada BPK RI tanggal 30 Oktober 2018-10 November 2018.

307. Dugaan TPK Penyalahgunaan Investasi pada PT. Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009 atas nama tersangka KGA yang penyidikannya dilaksanakan oleh Jampidsus Kejaksaan Agung RI.
- Kegiatan Koordinasi: Koordinasi bersama antara Penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Direktorat PP LHKPN dan KPK pada 12 November 2018 terkait dengan permintaan keterangan saksi LHKPN.
- Hasil Koordinasi: Penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI akan melaksanakan permintaan keterangan tersebut pada 16 November 2018.

308. Dugaan TPK Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2010 di PT. BNI SKC Bandung pada peternakan sapi Grup Simpang Jaya Dua dengan Plafon Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- Kegiatan Koordinasi: Koordinasi dengan Penyidik/Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam pencarian dan penangkapan DPO atas nama Terpidana H. DIDI SUPRIADI.
- Hasil Koordinasi: Penyidik/Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan penangkapan dan eksekusi atas nama Terpidana H. DIDI SUPRIADI di Lapas Sukamiskin Bandung.

309. Dugaan TPPU yang berasal dari TPK Pelaksanaan Program IP4T Tahun 2014 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan Penerbitan Sertifikat No. 475 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur diatas Tanah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur.
- Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Kejari Kotim pada kegiatan permintaan keterangan Ahli TPPU yang dilaksanakan pada 19 November 2018.
- Hasil Koordinasi: Ahli TPPU telah memberikan keterangan dalam BAP atas nama tersangka J.

310. Dugaan TPK penggunaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan sosialisasi/ penyuluhan pada SKPD/ OPD seluruh wilayah kecamatan di Kota Makassar yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
- Kegiatan Koordinasi: Fasilitasi Penyidik Bareskrim Polri pada kegiatan permintaan keterangan Ahli Keuangan Negara yang dilaksanakan pada 21 November 2018.
- Hasil Koordinasi: Ahli Keuangan Negara telah memberikan keterangan dalam BAP untuk Tersangka ESH.

311. Koordinasi dugaan TPK dalam pengadaan jasa konsutansi pada BLU PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
- Kegiatan Koordinasi: Pelimpahan penanganan dugaan TPK *a quo* dan serah terima dokumen.
- Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.

312. Koordinasi dugaan TPK dalam pemberian kredit dengan objek angunan SHM Nomor: 703, 698 dan 699 di Jl. Soekarno Hatta km 18, Kota Binjai, Komplek Puri Karunia Regency atas nama Deandles Sijabat oleh PT. BRI Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso tahun 2009 yang dilakukan oleh OKTAVIA SITUMORANG, ANTO SUHARTANTA dan DEANDLES SIJABAT yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Binjai.
- Kegiatan Koordinasi: Pemeriksaan saksi atas nama SOPAR SIBURIAN yang menjadi tahanan KPK.
- Hasil Koordinasi: Laporan data dan informasi perkembangan penanganan Perkara TPK dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.

313. Dugaan TPK pada pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 297 di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar seharga 600 juta oleh Unit Pengelola Kegiatan / UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Tanah Datar.
- Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar dalam pengambilan keterangan Ahli Keuangan Negara.
- Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar tanggal 11 Desember 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.

314. Dugaan TPK dalam pemungutan uang retribusi dan pengelolaan uang hasil pemungutan retribusi kegiatan pelayanan dan pengobatan hewan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan (BLKKH) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Jalan Rasuna Said 68 Padang yang terjadi sejak bulan Januari 2016 sampai tanggal 21 November 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat.
- Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam pengambilan keterangan Ahli Keuangan Negara.
- Hasil Koordinasi: Ahli telah memberikan keterangan dan dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Polda Sumatera Barat tanggal 12 Desember 2018. Kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan.

315. Dugaan TPK bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong untuk pengadaan buku perpustakaan SD/ SDLB senilai Rp.9.675.090.000 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Tabalong.
- Kegiatan Koordinasi: Koordinasi fasilitasi Penyidik/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong dalam pencarian dan penangkapan DPO atas nama Terpidana Hj. NENY KURNAENI binti H. MUHAMMAD AMIN
- Hasil Koordinasi: Terpidana Hj. NENY KURNAENI binti H. MUHAMMAD AMIN saat ini telah dieksekusi pidana badan oleh Kejari Tabalong di Lapas Banjarmasin.

316. Dugaan TPK pada pembelian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 297 di Jorong Tabek Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar seharga 600 juta oleh Unit Pengelola Kegiatan / UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tanah Datar yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Tanah Datar.
- Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
- Hasil Supervisi: KPK melalui Unit Koorsup memfasilitasi Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar dalam pengambilan keterangan Ahli Keuangan Negara.

317. Dugaan TPK Pengadaan Tanah Simpang Jalan Bogor Raya-Jalan Nangka TA 2015 atas nama tersangka HP dan NMI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Depok.
- Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah
- Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada hari Senin, 10 Desember 2018.

318. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
- Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka AW.
- Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada hari Senin, 10 Desember 2018.

319. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
- Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara atas nama tersangka AW.
- Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada hari Senin,10 Desember 2018.

320. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kaltim.
- Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Keuangan Daerah atas nama tersangka AW.
- Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Keuangan Daerah telah memberikan keterangan pada hari Selasa, 11 Desember 2018.

321. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim

Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
- Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Pertanahan atas nama tersangka HA.
- Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Pertanahan telah memberikan keterangan pada hari Selasa, 11 Desember 2018.

322. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
    - Kegiatan Koordinasi: Memfasilitasi Ahli di bidang Hukum Administarsi Negara atas nama tersangka HA.
    - Hasil Koordinasi: Ahli di bidang Hukum Administrasi Negara telah memberikan keterangan pada hari Selasa, 11 Desember 2018.
323. Dugaan TPK Pengadaan Tanah Simpang Jalan Bogor Raya-Jalan Nangka TA 2015 atas nama tersangka HP dan NMI yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Depok.
    - Kegiatan Koordinasi: Gelar Perkara
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polresta Depok, Penyidik Polda Metro Jaya, Penyidik pada Bareskrim Polri, Jaksa Peneliti Kejari Depok, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan KPK pada 13 Desember 2018 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 5 (lima) rekomendasi.
324. Dugaan TPK pembangunan RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo yang didanai dengan APBD TA 2009 dan 2010 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/100/V/2013/Satreskrim, tanggal 10 Mei 2013 oleh Polres Ponorogo.
    - Kegiatan koordinasi: Rapat gelar perkara dan penyusunan berkas perkara dalam rangka pemenuhan petunjuk (P19) oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Ponorogo.
    - Pelaksanaan koordinasi: Simpulan dan rekomendasi rapat koordinasi hasil gelar perkara.
325. Dugaan TPK pada Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I TA 2015 dan Tahap II TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku
    - Kegiatan Koordinasi: Pengambilan keterangan Ahli
    - Hasil Koordinasi: Telah dilaksanakan kegiatan Pengambilan Keterangan Ahli Kementerian PUPR Ditjen Sumber Daya Air dan Sungai oleh Penyidik Kejati Maluku tanggal 13 Desember 2018.
326. Dugaan TPK pada Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I TA 2015 dan Tahap II TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku
    - Kegiatan Koordinasi: Pengambilan keterangan Ahli
    - Pelaksanaan Koordinasi: Telah dilaksanakan kegiatan Pengambilan Keterangan Ahli Teknik Politeknik Negeri Bandung oleh Penyidik Kejati Maluku tanggal 14 Desember 2018.
327. Dugaan TPK Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kel. Padang Lambe dengan Nilai Kontrak Rp. 9.966.330.000 (Sembilan miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Pemasangan Jaringan Pipa Wilayah Kec. Telluwanua dengan Nilai Kontrak Rp. 4.643.170.000 (Empat miliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu rupiah) pada Dinas Tata Ruang dan dan Cipta Karya Kota Palopo yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo TA 2016 Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
    - Kegiatan Koordinasi: Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi.
    - Pelaksanaan Koordinasi: Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Auditor pada BPK RI tanggal 3 Desember 2018.

HASIL KLARIFIKASI KPK KEPADA APARAT PENEGAK HUKUM (APH)

1. Dugaan TPK berupa Penanaman Pohon Ketapang Kencana pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar TA. 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan.
    - Kegiatan Klarifikasi: Telah dikirimkan surat kepada Polda Sulawesi Selatan berdasarkan surat KPK-RI Nomor: R-77/KOR.06/20-25/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Klarifikasi Perkembangan Penyidikan Perkara TPK.
    - Hasil Klarifikasi: Polda Sulawesi Selatan telah mengirimkan Surat Nomor: B-255/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 perihal Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penanaman Pohon Ketapang Kencana Tahun 2016 dan telah dilaporkan ke Deputi Bidang PIPM melalui Nota Dinas Deputi Bidang Penindakan Nomor: ND-154/KOR.06/20-25/01/2018 tanggal 26 Januari 2018.
2. Dugaan TPK pada Proyek Pengaspalan Paket 10 (Pengaspalan Jalan Pal 12-Jalan 21) dan Paket 11 (Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun) tahun Anggaran 2013-2015 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo, Jambi.
    - Kegiatan Klarifikasi: Berdasarkan surat KPK tanggal 2 Januari 2018 dilakukan klarifikasi perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi.
    - Hasil Klarifikasi: Berdasarkan balasan surat Kajari Tebo tanggal 22 Januari 2018 yang menyatakan bahwa perkara tersebut disidik oleh Jampidsus Kejagung RI dan telah berkekuatan hukum tetap.

PELIMPAHAN

1. Koordinasi terkait pelimpahan perkara dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Pemeriksa Pajak terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Cengkareng Jakarta Barat untuk Tahun Pajak 2016 dengan Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan RI dan Kejaksaan Agung RI.
    - Kegiatan Koordinasi: Penyerahan dokumen/barang pelimpahan perkara dari Direktorat Penyelidikan KPK dan IBI KMK kepada Kejaksaan Agung RI pada 26 September 2018.
    - Hasil Koordinasi: Telah dilakukan penyerahan dokumen/barang dan kegiatan telah dilaporkan kepada Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas Nomor: 261/KOR.05/25/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

HASIL SUPERVISI (263 Perkara)

1. Dugaan TPK Pembangunan Jl. Sadaunta-Lindu dan Jl. Peana Kalamata pada Dinas PU Kabupaten Sigi TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulawesi Tengah.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Kejati Sulawesi Tengah pada 18 Januari 2018 dengan simpulan bahwa Penyidik akan berkoordinasi dengan Ahli teknis dari Univ. Tadulako untuk mengidentifikasi metode pemeriksaan fisik dan Penyidik akan mendukung kebutuhan data dan dokumen BPK RI dalam melakukan audit kerugian keuangan negara.
2. Dugaan TPK belanja bantuan sosial keagamaan berupa bantuan ibadah haji (otsus) Kabupaten Kaimana kepada 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dengan nama tersangka HH yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kaimana.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih berada di tahap penyidikan dan dalam tahap melengkapi Berkas Perkara sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-19).
    - Hasil Supervisi: Berdasarkan Surat Kajari Fakfak Nomor B-32/T.1.14/Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018, bahwa berkas perkara *a quo* sudah lengkap (P-21).
3. Dugaan TPK belanja bantuan sosial keagamaan berupa bantuan ibadah haji (otsus) Kabupaten Kaimana kepada 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dengan nama tersangka RRNS yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kaimana.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih berada di tahap penyidikan dan dalam tahap melengkapi Berkas Perkara sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-19).
    - Hasil Supervisi: Berdasarkan Surat Kajari Fakfak Nomor B-33/T.1.14/Fd.1/01/2018 tanggal 23 Januari 2018, bahwa berkas perkara *a quo* sudah lengkap (P-21).
4. Dugaan TPK belanja bantuan sosial keagamaan berupa bantuan ibadah haji (otsus) Kabupaten Kaimana kepada 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Tahun Anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012 dengan nama tersangka HH yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kaimana.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Fakfak (P-21).
    - Hasil Supervisi: Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat oleh Kepolisian Resor Kaimana, telah dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Fakfak.
5. Dugaan TPK belanja bantuan sosial keagamaan berupa bantuan ibadah haji (otsus) Kabupaten Kaimana kepada 40 (empat puluh) orang calon jamaah haji Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dengan nama tersangka RRNS yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kaimana.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Fakfak (P-21).
    - Hasil Supervisi: Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 26 Januari 2018 yang dibuat oleh Kepolisian Resor Kaimana, telah dilakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Fakfak.
6. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015 berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran Jasa *Cleaning Service* rumah jabatan Wali Kota Padang Panjang atas nama tersangka MF yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang Panjang.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Padang Panjang (P-21), namun

Penyidik Polres Padang Panjang mengalami kendala dalam menyerahkan tersangka (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum.
- Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Polres Padang Panjang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Padang Panjang nomor R/10/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n MARIA FIRONIKA, ST, SE pgl MARIA.

7. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015 berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran Jasa *Cleaning Service* rumah jabatan Wali Kota Padang Panjang atas nama tersangka RLS yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang Panjang.
   - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Padang Panjang (P-21), namun Penyidik Polres Padang Panjang mengalami kendala dalam menyerahkan tersangka (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum.
   - Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Padang Panjang nomor R/11/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n RLS.
8. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015 berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran Jasa *Cleaning Service* rumah jabatan Wali Kota Padang Panjang atas nama tersangka RLS yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang Panjang.
   - Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum dilimpahkan ke Pengadilan.
   - Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara atas nama terdakwa RHICI LIMA SAZA Pgl RHICI ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang berdasarkan surat pelimpahan perkara nomor: B-43/N.3.16/Ft.1/01/2018 tanggal 16 Januari 2018.
9. Dugaan TPK Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang berasal dari APBD TA 2014 dan TA 2015 berupa belanja jasa non pegawai pada mata anggaran Jasa *Cleaning Service* rumah jabatan Wali Kota Padang Panjang atas nama tersangka MF. yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Padang Panjang.
   - Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum dilimpahkan ke Pengadilan
   - Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara atas nama terdakwa MARIA FIRONIKA, ST, SE ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor: B-46/N.3.16/Ft.1/02/2018 tanggal 16 Januari 2018.
10. Dugaan TPK penyalahgunaan/ penyimpangan pengadaan prasarana dan sarana air bersih di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka ASMI. B yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih dalam tahap penyidikan dan Penyidik mengalamai hambatan dalam menghitung kerugian keuangan negara.
    - Hasil Supervisi: Berdasarkan Surat Kajari Pariaman Nomor: B-89/N.3.13/Fd.1/01/2018 tanggal 10 Januari 2018, bahwa berkas perkara *a quo* sudah lengkap (P-21).
11. Dugaan TPK dengan cara melakukan pemungutan liar dalam pelayanan pengobatan vaksin kepada hewan di Kantor UPTD BLKKH pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar dengan nama tersangka S yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap penyidikan dan Penyidik mengalami hambatan untuk memenuhi petunjuk Jaksa Peneliti Berkas Perkara (P-19) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
    - Hasil Supervisi: Berdasarkan Surat Kajari Pariaman Nomor: B-89/N.3.13/Fd.1/01/2018 tanggal 10 Januari 2018, bahwa berkas perkara *a quo* sudah lengkap (P-21).
12. Dugaan TPK penyalahgunaan/ penyimpangan pengadaan prasarana dan sarana air bersih di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka AB yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum tahap II.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan pengiriman Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Kasipidsus Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor: B-93/N.3.13/Fd.1/01/2018 tanggal 11 Januari 2018.
13. Dugaan TPK penyalahgunaan/ penyimpangan pengadaan prasarana dan sarana air bersih di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka AB yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman.
    - Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum dilimpahkan ke Pengadilan.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara atas nama terdakwa ASMI. B., Dipl. ATP ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berdasarkan surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa nomor: B-203/N.3.13/Ft.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018.
14. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret 2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok Selatan atas nama tersangka A yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum dilakukan penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Solok Selatan Nomor R/173/XI/2017 Reskrim tanggal 15 November 2017 perihal Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti a.n Tersangka A.
15. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret 2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok Selatan atas nama tersangka ABK yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum dilakukan penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Solok Selatan Nomor R/171/XI/2017 Reskrim tanggal 15 November 2017 perihal Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti a.n Tersangka Drs. H. ADRIL DT BANDARO KUNIANG.
16. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret 2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok Selatan atas nama tersangka EZ yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum dilakukan penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Solok Selatan Nomor R/170/XI/2017 Reskrim tanggal 15 November 2017 perihal Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti a.n Tersangka EZ.
17. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret 2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok Selatan atas nama terdakwa AKHIARLI, SE, MM yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum dilimpahkan ke Pengadilan.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara atas nama terdakwa AKHIARLI, SE, MM ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor: B-1748/N.3.25/Ft.1/12/2017 tanggal 11 Desember 2017.
18. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret 2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok Selatan atas nama tersangka ABK yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum dilimpahkan ke Pengadilan.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara atas nama terdakwa Drs. H. ADRIL DT BANDARO KUNIANG ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor: B-1749/N.3.25/Ft.1/12/2017 tanggal 11

Desember 2017.

19. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret 2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok Selatan atas nama tersangka EZ yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), namun belum dilimpahkan ke Pengadilan.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan pelimpahan perkara atas nama terdakwa ERIFAL ZESKIN, SE. ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa nomor: B-1747/N.3.25/Ft.1/12/2017 tanggal 11 Desember 2017.
20. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret 2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok Selatan atas nama tersangka AKH yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Solok Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap penyidikan dan belum ada kesamaan pendapat antara Penyidik dengan JPU terkait konstruksi melawan hukum dan kerugian keuangan negara.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan atas nama tersangka AKH telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor: B-1312/N.3.25/Fd.1/09/2017 tanggal 19 September 2017.
21. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret 2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok Selatan atas nama tersangka ABK yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Solok Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap penyidikan dan belum ada kesamaan pendapat antara Penyidik dengan JPU terkait konstruksi melawan hukum dan kerugian keuangan negara.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan atas nama tersangka ABK telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor: B-1311/N.3.25/Fd.1/09/2017 tanggal 19 September 2017.
22. Dugaan TPK Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Solok Selatan, yang terjadi sekitar bulan Maret 2010, bertempat di Kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Solok Selatan atas nama tersangka EZ yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Solok Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara dalam tahap penyidikan dan belum ada kesamaan pendapat antara Penyidik dengan JPU terkait konstruksi melawan hukum dan kerugian keuangan negara.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan atas nama tersangka EZ telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor: B-1310/N.3.25/Fd.1/09/2017 tanggal 19 September 2017.
23. Dugaan TPK atau penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan dalam menggunakan Dana Block Gran 2008, ADD 2009, dan ADD 2010 di Desa Bencah Kelubi, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kampar.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka ZA telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajari Kampar Nomor: B-621/N.4.16/Ft.1/08/2017 tanggal 01 Agustus 2017.
24. Dugaan TPK tentang menerima hadiah/janji berupa uang yang diketahui tidak sah dalam melakukan suatu proses penerbitan persetujuan ijin prinsip mendirikan Hotel Avani & Resort yang berlokasi di Mumbul Nusa Dua Bali yang tidak sesuai dengan peraturan dan bertentangan dengan Standard Operasional Prosedur tentang pelayanan terhadap masyarakat untuk perolehan ijin prinsip mendirikan bangunan Hotel Aviani & resort bertempat di Pemerintah/Wilayah Kabupaten Badung yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan.
    - Hasil Supervisi: Telah dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara tersebut berdasar Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor SPDP/04.a/XI/2017/Ditreskrimsus tanggal 28 November 2017.
25. Dugaan TPK pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kel. Padang Lambe Kec. Wara Barat dengan nilai kontrak Rp 9.966.330 dan Dugaan TPK pengadaan dan pemasangan jaringan pipa wilayah Kec. Telluwanua dengan nilai kontrak Rp 4.643.170.000 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulsel.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Polda Sulsel pada 11 Desember 2017. Kegiatan telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
26. Dugaan TPK pada Kegiatan Membangun Kemitraan Kebudayaan Antar Daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bengkulu Selatan TA. 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bengkulu Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polres Bengkulu Selatan pada 30 Oktober 2017.
    - Hasil Supervisi: Perkara sudah P-21 dengan Surat Kejati Bengkulu Nomor: B-3187/N.7.5/Ft.1/2017 pada 8 Desember 2017 dan sudah Tahap II dengan Surat Polda Bengkulu Nomor: BB/11/I/2018/Dit Reskrimsus tanggal 10 Januari 2018.
27. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Kejati Sulawesi Tengah pada 8 Februari 2018 dengan simpulan bahwa Penyidik, BPK dan Ahli Teknis sepakat untuk memperluas objek penyidikan sejak dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan pengadaan untuk kepentingan perhitungan kerugian negara dengan potensi total loss dan untuk memperkuat perhitungan kerugian negara dengan potensi total loss diperlukan Coastal Expert dan Ahli dari LKPP.
28. Dugaan TPK dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA 2014 Tahap IV dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan nilai bantuan sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Tapanuli Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Kejati Sulawesi Tengah pada 12 Februari 2018 dengan simpulan bahwa sudah tergambar peran dari pihak selain Tersangka yang telah ditetapkan dalam dugaan tindak pidana korupsi ini.
29. Dugaan TPK Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan namun belum ada penetapan tersangka, karena masih menunggu audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.
    - Pelaksanaan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Kejaksaan Negeri Pariaman pada 14 Februari 2018 dengan simpulan bahwa Tim Koorsup KPK akan berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat terkait penghitungan kerugian keuangan negara serta melakukan fasilitasi, monitoring penanganan perkara dan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyidikan agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
30. Dugaan TPK dengan cara melakukan pemungutan liar dalam pelayanan pengobatan vaksin kepada hewan di Kantor UPTD BLKKH pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sumbar dengan nama tersangka S yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21), namun belum dilakukan penyerahan tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar Nomor R/89/I/2018/Direskrimsus tanggal 30 Januari 2018 perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama tersangka SYA.
31. Dugaan TPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2008 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Solok Selatan.

    Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan, dan terdapat kendala dalam penanganannya.

    Hasil Supervisi: Perkara atas nama tersangka JHB dilakukan penghentian penyidikan (SP3) dengan surat perintah penghentian penyidikan Kajati Sumatera Barat Nomor: PRINT-645/N.3/Fd.1/11/2017 tanggal 21 November 2017.
32. Dugaan TPK tentang menerima hadiah/janji berupa uang yang diketahui tidak sah

dalam melakukan suatu proses penerbitan persetujuan ijin prinsip mendirikan Hotel Avani & Resort yang berlokasi di Mumbul Nusa Dua Bali yang tidak sesuai dengan peraturan dan bertentangan dengan Standard Operasional Prosedur tentang pelayanan terhadap masyarakat untuk perolehan ijin prinsip mendirikan bangunan Hotel Aviani & resort bertempat di Pemerintah/Wilayah Kabupaten Badung, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Bali
- Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan;
- Hasil Supervisi: Telah dilakukan Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara tersebut berdasarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor SPDP/04.a/XI/2017/Ditreskrimsus tanggal 28 November 2017.

33. Dugaan TPK alih fungsi lahan pada Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai pada lokasi Banjar Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atas nama tersangka IWR, yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Bali.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan;
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka IWR telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajati Bali Nomor: B-229/P.1.5/Ft.1/01/2018 tanggal 22 Januari 2018.
34. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Polda Jambi pada 31 Januari 2018 di Kantor Polda Jambi.
35. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Aceh.
    - Kegiatan Supervisi: KPK melalui KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Kejati Sulsel pada 7 Februari 2018.
    - Hasil Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas. (bisa dijabarkan)
36. Dugaan TPK Adanya Dugaan Penyimpangan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Aceh.
    - Kegiatan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Kejati Aceh pada 7 Februari 2017.
    - Hasil Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas. (bisa dijabarkan)
37. Dugaan TPK Penyalahgunaan Kewenangan Penggunaan Anggaran pada Pemda Gayo Lues melalui Pinjaman Sementara (Kasbon) tahun 2003-2006 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Aceh.
    - Kegiatan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda dan Kejati Aceh pada 7 Februari 2017.
    - Hasil Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas. (bisa dijabarkan)
38. Dugaan TPK menerima hadiah atau janji kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tahun 2008-2016, yang diduga dilakukan oleh AHMAD DEDI selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya.
    - Posisi sebelum supervisi: Memfasilitasi gelar perkara bersama antara Penyidik pada Polda Metro Jaya dengan Unit Koordinasi Supervisi Penindakan KPK yang bertempat di Ruang Rapat Gedung Merah Putih KPK RI pada 7 Februari 2018. Penyidikan tersebut telah dilaksanakan oleh Bareskrim Polri kemudian dilimpahkan ke Polda Meto Jaya.
    - Pelaksanaan supervisi: Hasil gelar perkara yang dilaksanakan, agar penyidik segera menerbitkan SPDP dan menyampaikan kepada Kejati DKI dan KPK, menyampaikan permintaan tertulis kepada KPK terkait data yang diperlukan untuk pembuktian perkara dan segera menyelesaikan penyidikan perkara tersebut. Kemudian, Penyidik pada Polda Metro Jaya telah mengirimkan SPDP kepada KPK dengan Nomor B/3353/II/2018/ Datro pada 15 Februari 2018.
39. Dugaan TPK terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik tahun 2011-2012 yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya, yaitu pekerjaan pengurugan lahan rencana Gedung Laboratorium PSPD atas nama tersangka YR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Kalimantan Tengah.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap II berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah nomor: B-1854/Q.2.5/ Ft.1/09/2017 tanggal 7 September 2017
    - Hasil Supervisi: *Inkracht*. Putusan PN Palangkaraya No.55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk.
40. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas nama tersangka TJ yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Penyidikan dan telah dilakukan gelar perkara antara penyidik Polda Sumsel, Bareskrim Polri, dan KPK.
    - Posisi setelah supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejati Sumsel nomor B-862/N.6.5/ Ft.1/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.
41. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap penyidikan, penyidik belum menetapkan pihak penyedia barang jasa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana
    - Posisi Setelah Supervisi: Tanggal 6 Februari 2018, Ditreskrimsus Polda Sumsel telah menetapkan atas nama tersangka MT (penyedia barang jasa) berdasarkan Surat Ketetapan No:SK/02/II/1018/Kor/ Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka.
42. Dugaan TPK penyalahgunaan dana dekonsentrasi bersumber dari P-APBN sebesar Rp.41.809.700.000 Pemerintah Desa Se-Sumatera Utara untuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sumatera Utara.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara pada tingkat penuntutan untuk terdakwa atas nama BUDHIYANTO SURYANATHA dan RAHMAT JAYA PRAMANA serta masih ditingkat penyidikan untuk tersangka atas nama EDBD dan THM terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Kejati Sumatera Utara pada 8 Maret 2018 dengan simpulan bahwa Unit Kerja Koorsup Penindakan juga akan melakukan fasilitasi pencarian tersangka atas nama TAUFIK H. M. yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan akan melakukan fasilitasi perekaman sidang terhadap proses persidangan atas nama terdakwa BUDHIYANTO SURYANATHA dan RAHMAT JAYA PRAMANA.
43. Dugaan TPK dalam pengadaan cadangan batubara oleh PT. Perusahaan Listrik Negara Batubara (PT. PLN BB) yang bekerja sama dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Kejati DKI Jakarta pada 14 Maret 2018 dengan simpulan bahwa Unit Kerja Koorsup Penindakan akan melakukan fasilitasi pengambilan keterangan Ahli Keuangan Negara.
44. Dugaan TPK dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi Jakarta periode 2011-2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati DKI Jakarta.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Kejati Sumatera Utara pada 28 Maret 2018 dengan simpulan bahwa Unit Kerja Koorsup Penindakan akan melakukan fasilitasi Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, *asset tracing* terkait perkara *a quo* serta pencarian tersangka atas nama HN yang telah termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tersangka atas nama NSG setelah yang diterbitkan DPO atas nama tersangka dimaksud.
45. Perkara Pengembangan OTT Pungutan Liar UPTD BLKKH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat.
    - Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
    - Pelaksanaan Supervisi: KPK melalui Unit Koorsup melakukan supervisi terhadap penanganan perkara *a quo* dengan melaksanakan gelar perkara pada 20 Maret 2018 dan dalam salah satu rekomendasinya KPK akan memfasilitasi Penyidik Polda Sumatera Barat untuk mengambil keterangan Ahli Keuangan Negara.
46. Dugaan TPK dalam penyalahgunaan wewenang atas penggunaan Dana Hibah uang dari APBD Kab. Blitar TA. 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000 untuk KONI Kab. Blitar yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Blitar.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih dalam tahap penyidikan dan mengalami kendala dalam penanganannya.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka DWHS telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 30 Oktober 2017.
47. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau

penerimaan pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro
- Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih dalam tahap penyidikan dan mengalami kendala dalam penanganannya.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SH telah dinyatakan lengkap (P21) tanggal 04 Desember 2017.

48. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SH telah dinyatakan lengkap (P21).
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SH telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) pada 11 Januari 2018.
49. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro TA 2016 yang penyidikan dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SH telah dinyatakan lengkap (P21) dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2).
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SH telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Surabaya.
50. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara masih dalam tahap penyidikan dan mengalami kendala dalam penanganannya.
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SM telah dinyatakan lengkap (P21) tanggal 04 Desember 2017.
51. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SM telah dinyatakan lengkap (P21).
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SM elah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) pada 11 Januari 2018.
52. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau penerimaan pemberian sesuatu oleh Pegawai Negeri secara melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan jabatannya terkait pengadaan barang/ jasa di kantor pemerintahan Setda Kab. Bojonegoro TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Bojonegoro
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SM telah dinyatakan lengkap (P21) dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2).
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SM. telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Surabaya.
53. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum di tetapkan tersangka lain.
    - Posisi sesudah supervisi: Telah ditetapkan tersangka atas nama JN..
54. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum di tetapkan tersangka lain.
    - Posisi sesudah supervisi: Telah ditetapkan tersangka atas nama KN.
55. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum di tetapkan tersangka lain.

    - Posisi sesudah supervisi: Telah ditetapkan tersangka atas nama FU Bin DH.
56. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Posisi setelah Supervisi: Telah dilaksanakan Gelar Perkara tanggal 5 Maret 2018 bersama Penyidik pada Dit. Tipidkor Bareskrim Polri dan Unit Koorsupdak, Agar Penyidik Bareskrim melaksanakan pemeriksaan terhadap pihak terkait lain yang mendukung pemenuhan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan dan Unit Koorsupdak segera memfasilitasi Ahli Teknik Eksplorasi, Ahli Keuangan Negara dan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa.
57. Dugaan TPK penyimpangan dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat tembok pantai Desa Ongkaw pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Kejari Minahasa Selatan dan Ahli Oseanografi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 17 April 2018 dengan simpulan bahwa terhadap penanganan perkara *a quo* KPK akan memfasilitasi Ahli Oseanografi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Ahli Teknik Kelautan dari ITS dan Ahli Struktur dari Polban.
58. Dugaan TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Kab. Minsel untuk pekerjaan konstruksi tembok pengaman pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Kejari Minahasa Selatan dan Ahli Oseanografi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 17 April 2018 dengan simpulan bahwa terhadap penanganan perkara *a quo* KPK akan memfasilitasi Ahli Oseanografi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Ahli Teknik Kelautan dari ITS dan Ahli Struktur dari Polban.
59. Dugaan TPK Penyalahgunaan Wewenang dan Kesempatan serta Perbuatan Curang dalam Kegiatan Proyek Bangsal Bedah dan Penyakit dalam THP I RSUD H. Hasan Basery APBD yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
    - Hasil Supervisi: Perkara atas nama tersangka A telah dinyatakan lengkap penyidikannya dengan Surat P-21 dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.
60. Dugaan TPK Penyalahgunaan Wewenang dan Kesempatan serta Perbuatan Curang dalam Kegiatan Proyek Bangsal Bedah dan Penyakit dalam THP I RSUD H. Hasan Basery APBD yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan melalui Surat P21.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.
61. Dugaan TPK Pembangunan Gedung Kantor Tahap I pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah.
    - Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
    - Hasil Supervisi: Perkara atas nama tersangka AN telah dinyatakan lengkap penyidikannya dengan Surat P-21 dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.
62. Dugaan TPK Pembangunan Gedung Kantor Tahap I pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai Tahun Anggaran 2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah melalui Surat P21.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah.
63. Dugaan TPK Tukar Guling Tanah Bengkok Pemerintah Kota Tegal dengan Tanah Milik PT. COM yang terletak di Kawasan Bokong Semar Kota Tegal yang penyidikan dilaksanakan oleh Polres Kota Tegal.
    - Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
    - Hasil Supervisi: Perkara atas nama

tersangka H bin S (Alm) telah dinyatakan lengkap penyidikannya dengan Surat P-21 dari Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

64. Dugaan TPK Tukar Guling Tanah Bengkok Pemerintah Kota Tegal dengan Tanah Milik PT. COM yang terletak di Kawasan Bokong Semar Kota Tegal yang penyidikan dilaksanakan oleh Polres Kota Tegal.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas Perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal melalui Surat P21.
    - Hasil Supervisi: Telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal.
65. Dugaan TPK Dana Bansos Pura Pemaksan Arak Api, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Tabanan.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Tabanan, Penyidik Polda Bali, Jaksa Peneliti Kejari Tabanan, Jaksa pada Kejati Bali dan KPK pada 17 April 2018, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur melawan hukum, penyidik akan melakukan pendalaman terhadap pihak terkait dan ahli keuangan daerah yang mendukung pembuktian perkara tersebut.
66. Dugaan TPK pada pekerjaan rehab sedang/ berat Gedung SDN 4 Penatih Denpasar Tahun Anggaran 2012, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Denpasar.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polresta Denpasar, Penyidik Polda Bali, Jaksa Peneliti Kejari Denpasar, Jaksa pada Kejati Bali, serta KPK pada 17 April 2018, yang pada intinya penyidik belum menemukan unsur *mens rea* dari tersangka dan diharapkan dapat segera mengambil sikap demi kepastian hukum.
67. Dugaan TPK penyimpangan/penyalahgunaan biaya pemungutan PBB di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2005-2010, yang penyidikannya dilakukan oleh Kejari Bangli.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
    - Hasil supervisi: Terhadap berkas perkara atas nama tersangka INA telah dinyatakan lengkap (P21) berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Bangli Nomor: B-488/P.1.13/ Ft.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018.
68. Dugaan TPK dalam proses pemberian kredit Invertasi Refinancing kepada debitur atas nama PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp 23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah) pada 2007 dan sebesar Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah) pada 2008 oleh PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Sentra Kredit Kecil Pekanbaru yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedural, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Riau.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Riau, Jaksa Peneliti Kejati Riau, serta KPK pada 24 April 2018, yang pada intinya dalam rangka memenuhi perbuatan melawan hukum dari tersangka yang berprofesi sebagai notaris, penyidik memerlukan keterangan dari ahli di bidang kenoktariatan dan ahli hukum administrasi negara.
69. Dugaan TPK pengelolaan dana anggaran pendapatan belanja kampung Jati Mulya yang dilakukan oleh Penghulu Kampung Jati Mulya Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polres Siak.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Siak, Jaksa Peneliti Kejari Siak, Jaksa pada Kejati Riau, serta KPK pada 25 April 2018, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur melawan hukum, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tersebut serta perlunya pemahaman bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana.
70. Dugaan TPK pada Pembangunan Resetlement di Bangko Kanan Kec. Bangko Pusako yang dikerjakan oleh CV. Karya Indah dengan nilai kontrak Rp727.389.000 yang berasal dari APBD Kab. Rohil TA 2014, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Rokan Hilir.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Rokan Hilir, Jaksa Peneliti Kejari Rokan Hilir, Jaksa pada Kejati Riau, serta KPK pada 25 April 2018, yang pada intinya penyidik belum menemukan unsur *mens rea* dari tersangka dan diharapkan dapat segera mengambil sikap demi kepastian hukum.
71. Dugaan TPK dalam Kegiatan Pematangan Lokasi Pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Kecamatan Pucuk Rantau, Kab. Kuansing pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kuantan Singingi TA 2013, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kuantan Singingi.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik olres Kuantan Singingi, Jaksa Peneliti Kejari Kuantan Singingi, Jaksa pada Kejati Riau, serta KPK pada 25 April 2018, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur melawan hukum, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan melakukan konsultasi dengan atasan pembina fungsi teknis.
72. Dugaan TPK pada pekerjaan pemeliharaan tanah dan jalur (penanaman pohon ketapang kencana) pada Dinas Penanaman dan Kebersihan kota Makassar TA 2016 atas nama tersangka AGS yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan.
    - Posisi Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Sulsel pada 17 April 2018.
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
73. Dugaan TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diurus atau diawasinya atas nama tersangka ESH yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan.
    - Posisi Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Sulsel pada 17 April 2018.
    - Hasil Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
74. Dugaan TPK Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM TA 2016 atas nama tersangka AGS dkk yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.
    - Posisi Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan pada 17 April 2018.
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
75. Dugaan TPK Dana APBD Kota Palembang TA. 2013 pada Kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Ogan Ilir yang berlokasi di Jakabaring yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Palembang
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Polresta Palembang, Dit Reskrimsus Polda Sumsel, dan KPK pada 9 April 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 6 (enam) rekomendasi.
76. Dugaan TPK Dana APBD Kota Palembang TA. 2013 pada Kegiatan Pembangunan Gerbang Batas Kota Palembang-Banyuasin berlokasi di jalan Tanjung api-api Kec Sukarame Kota Palembang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Palembang
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Polresta Palembang, Dit Reskrimsus Polda Sumsel, dan KPK pada 10 April 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
77. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas nama tersangka MT yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumsel.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan.
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Polda Sumsel dan KPK pada 10 April 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 5 (lima) rekomendasi.
78. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas nama tersangka TJ yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumsel.
    - Posisi sebelum supervisi: Proses Penyidikan.
    - Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejati Sumsel nomor B-862/N.6.5/ Ft.1/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.
79. Dugaan TPK pada penjualan minyak mentah milik Pertamina RU-III dari MT Andhika Arsanti ke MT Merlion Dua sebanyak kurang lebih 500 KL yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumsel.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap penyidikan
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Polda Sumsel dan KPK pada 10 April 2018 dengan 5 (lima) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
80. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/ lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan.
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Kejari Palembang dan KPK pada 11 April 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 2 (dua) rekomendasi.
81. Dugaan TPK pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada kegiatan pengadaan tanah Taman Pemakaman Umum Baturaja Kabupaten OKU sumber dana APBD tahun anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumsel.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik

Polda Sumsel dan KPK pada 12 April 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi

82. Dugaan TPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Barat dan Perangkatnya Tahap I Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Lampung Barat.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Kejari Lampung Barat dan KPK pada 25 April 2018 dengan 5 (lima) kesimpulan dan 2 (dua) rekomendasi.
83. Dugaan TPK dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2016 yang ditangani oleh Kejati Lampung.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Kejati Lampung dan KPK pada 25 April 2018 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
84. Dugaan TPK pada Peningkatan Jalan Ruas Bumi Jawa-Purbolinggo oleh CV. Tangguh Serasi senilai Rp 2.141.800.000 pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015 yang ditangani oleh Kejati Lampung.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Kejati Lampung dan KPK pada 25 April 2018 dengan 7 (tujuh) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
85. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal.
    - Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan Gelar Perkara pertama antara Tim Koorsup Penindakan KPK, Kejati Jawa Tengah beserta jajaran, serta Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kendal.
86. Dugaan TPK Pembangungan Jalan Sadaunta-Lindu dan Jalan Peana-Kalamanta pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulawesi Tengah.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara *a quo* masih dalam tahap penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Hasil Supervisi: Perkara dihentikan penyidikannya (SP3).
87. Dugaan TPK memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara karena terkait proyek 1: 5000 dengan metode fotogrametris atas nama tersangka PPY yang penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan dan terkendala tersangka DPO (telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Polda Kaltim dan Unit Koordinasi Supervisi pada 15 Juni 2016)
    - Posisi setelah Supervisi: P-21 berdasarkan Surat Kepala Kejati Kalimantan Timur Nomor B-019/Q-4.5/Fd.1/1/2018 tanggal 17 Januari 2018.
88. Dugaan TPK memberikan sesuatu kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara karena terkait proyek 1: 5000 dengan metode fotogrametris yang penyidikan dilakukan oleh Penyidik Kejati Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: P-21 berdasarkan Surat Kepala Kejati Kalimantan Timur Nomor B-019/Q-4.5/Fd.1/1/2018 tanggal 17 Januari 2018
    - Posisi setelah Supervisi: Tahap II (pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka PPY) berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim Nomor R/140.b/II/2018/DitReskrimsus pada 12 Februari 2018.
89. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group senilai Rp 7.012.919.000 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur dan Unit Koordinasi Supervisi pada 12 Oktober 2016, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli yang diperlukan oleh penyidik Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi setelah Supervisi: P-21 tersangka atas nama R Bin K berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-401/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
90. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group senilai Rp 7.012.919.000 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: P-21 tersangka atas nama R Bin K berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-401/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
    - Posisi setelah supervisi: Tahap II (pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka R Bin K) berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim Nomor B/76.b/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2017.
91. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group senilai Rp 7.012.919.000 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan penyidikan oleh Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur dan Unit Koordinasi Supervisi pada 12 Oktober 2016, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli yang diperlukan oleh penyidik Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi setelah supervisi: P-21 tersangka atas nama JHS Bin S berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-402/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
92. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group senilai Rp 7.012.919.000 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan penyidikan oleh Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: P-21 tersangka atas nama JHS Bin S berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-402/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017
    - Posisi setelah Supervisi: Tahap II (pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka JHS Bin S) berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim Nomor B/14.c/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2017.
93. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group senilai Rp 7.012.919.000 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur dan Unit Koordinasi Supervisi pada 12 Oktober 2016, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli yang diperlukan oleh penyidik Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi setelah Supervisi: P-21 tersangka atas nama AGA Bin A berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-400/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
94. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 1 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Andika Lestari Group senilai Rp 7.012.919.000 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim TA. 2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: P-21 tersangka atas nama AGA Bin A berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-400/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017
    - Posisi setelah Supervisi: Tahap II (pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka AGA bin A) berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim Nomor B/73.b/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2017.
95. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp 14.291.834.000 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur dan Unit Koordinasi Supervisi pada 12 Oktober 2016, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang dapat diminta

pertanggungjawaban pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli yang diperlukan oleh penyidik Polda Kalimantan Timur.
- Posisi setelah Supervisi: P-21 tersangka atas nama R Bin K berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-403/Q.4.5/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.

96. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp 14.291.834.000 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: P-21 tersangka atas nama R Bin K berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-401/Q.4.4/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017
    - Posisi setelah Supervisi: Tahap II (pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka R Bin K) berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim Nomor B/74.b/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2017.
97. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp 14.291.834.000 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat yang penyidikan dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur dan Unit Koordinasi Supervisi pada 12 Oktober 2016, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli yang diperlukan oleh penyidik Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi setelah Supervisi: P-21 tersangka atas nama AW Bin MI berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-404/Q.4.5/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
98. Dugaan TPK pada Proyek Peningkatan Jalan Simpang Bukit Harapan 2 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang dikerjakan oleh PT. Bunga Arafat senilai Rp 14.291.834.000 yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2014 pada SKPD Dinas PU Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan penyidikan oleh Polda Kalimantan Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: P-21 tersangka atas nama AW Bin MI berdasarkan surat Kejati Kaltim Nomor B-404/Q.4.5/Ft.1/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017
    - Posisi setelah Supervisi: Tahap II (pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama tersangka AW Bin MI) berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Kaltim Nomor B/75.b/X/2017/Ditreskrimsus tanggal 31 Oktober 2017.
99. Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana APBD (DAK Tambahan) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 sehubungan dengan Proyek Pembangunan Jalan Fatcey-Fagudu (Reklamasi) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupatan Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2015 yang penyidikan dilakukan oleh Polda Maluku Utara.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Posisi setelah supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Maluku Utara dan KPK pada 8 Mei 2018, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli yang diperlukan oleh penyidik Polda Maluku Utara.
100. Dugaan TPK Pemotongan dan Penggelapan Dana Desa Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp4.010.000.000 dan atau Pencucian Uang yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan penyidikan oleh Polda Maluku Utara.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Posisi setelah supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Maluku Utara dan KPK pada 8 Mei 2018, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi terkait alokasi dana penggelapan.
101. Dugaan TPK Penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 sehubungan dengan Proyek Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap I Dana Alokasi Umum (DAU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015 yang penyidikan dilakukan oleh Polda Maluku Utara.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Posisi setelah supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Maluku Utara dan KPK pada 9 Mei 2018, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli yang diperlukan oleh penyidik Polda Maluku Utara.
102. Dugaan TPK Penyalahgunaan anggaran "Tunjangan kepala sekolah dan pengawas TA 2015" yang bersumber dari APBD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp1.005.060.000 yang penyidikan dilakukan oleh Polda Maluku Utara.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Posisi setelah Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Maluku Utara dan KPK pada 9 Mei 2018, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi dan melakukan penyitaan terhadap rekening koran dan mutasinya milik pihak yang terlibat.
103. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan penyidikan oleh Polda Maluku Utara.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Posisi setelah Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Kalimantan Timur dan KPK pada 17 Mei 2018, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur perbuatan melawan hukum dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi terkait proses perubahan anggaran, proses penerbitan sertifikat tanah, dan proses pengadaan lahan dan ahli yang mendukung pembuktian penyidikan perkara tersebut. Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli yang diperlukan oleh penyidik Polda Maluku Utara.
104. Dugaan TPK Pelayanan Administrasi Perkantoran Pekerjaan Pengadaan Cetak dan Penggandaan, Pengadaan ATK dan Belanja Makan dan Minum Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPPM) Kota Bandung Jl. Wastukencana No. 2 Kota Bandung yang sumber anggarannya dari APBD TA 2012, atas nama tersangka MAW, yang penyidikannya dilakukan oleh Polrestabes Bandung
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Posisi setelah Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polrestabes Bandung, Penyidik Polda Jawa Barat, Jaksa Peneliti Kejari Bandung, dan Jaksa pada Kejati Jawa Barat serta KPK pada 30 Mei 2018, yang pada intinya agar penyidik segera memenuhi petunjuk Jaksa Peneliti untuk menetapkan pihak rekanan sebagai tersangka dalam perkara *a quo* dan mengirimkan SPDPnya kepada Kejaksaan dan KPK, segera menyerahkan berkas perkara MA dan Tersangka EW kepada Jaksa Peneliti, melakukan koordinasi secara intensif dengan Jaksa Peneliti pada Kejari Bandung terkait dengan pemenuhan petunjuk Jaksa Peneliti, dan apabila dianggap perlu, KPK akan melakukan gelar perkara lanjutan antara Penyidik dan Jaksa Peneliti.
105. Dugaan TPK Pembangunan Jalan Lingkungan RW 02, 03, 04, 05, 06, 09, dan 10 serta rehab gedung RW 06 Kelurahan Warung Muncang Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Pemerintah Kota Bandung TA 2015, penyidikannya dilakukan oleh Polrestabes Bandung.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Posisi setelah Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polrestabes Bandung, Penyidik Polda Jawa Barat, Jaksa Peneliti Kejari Bandung, dan Jaksa pada Kejati Jawa Barat serta KPK pada 30 Mei 2018, yang pada intinya agar penyidik menetapkan DIAN ROSDIANSYAH menjadi tersangka dalam perkara ini, sehubungan keberadaan DIAN ROSDIANSYAH tidak diketahui, agar diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) beserta surat keterangan dari kepala lingkungan setempat tentang keberadaan yang bersangkutan, melakukan penyitaan uang dari pihak yang ikut menerima aliran dana yang berasal dari hasil perkara *a quo*, segera menyerahkan berkas perkara *a quo* kepada Jaksa Peneliti setelah memenuhi petunjuk di atas, melakukan koordinasi secara intensif dengan Jaksa Peneliti, dan apabila dianggap perlu, KPK akan melakukan gelar perkara lanjutan antara Penyidik dan Jaksa Peneliti.

106. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor (KIR) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, atas nama tersangka DS Bin M, penyidikan dilakukan oleh Polres Purwakarta.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Posisi setelah Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polres Purwakarta, Penyidik Polda Jawa Barat, Jaksa Peneliti Kejari Purwakarta, dan Jaksa pada Kejati Jawa Barat serta KPK pada 31 Mei 2018, yang pada intinya agar penyidik memperdalam perbuatan turut serta oleh tersangka DS dalam perkara *a quo*, melakukan koordinasi secara intensif dengan Jaksa Peneliti Kejari Purwakarta terkait dengan pemenuhan petunjuk Jaksa Peneliti, dan apabila dianggap perlu, KPK akan melakukan gelar perkara lanjutan antara Penyidik Polres Purwakarta dan Jaksa Peneliti Kejari Purwakarta.
107. Dugaan TPK Prembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri APBD 2010-2013 Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor: Sprin-Sidik/157/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 26 April 2013 oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka NISW masih dalam proses penyidikan.
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka NISW telah telah dinyatakan lengkap (P21) berdasarkan surat Kajati Jawa Timur nomor: B-6251/O.5.5/Ft.1/12/2017, tanggal 06 Desember 2017.
108. Dugaan TPK Prembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri APBD 2010-2013 Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Dirreskrimsus Polda Jatim Nomor:Sprin-Sidik/157/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 26 April 2013 oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.
    - Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka NISW telah dinyatakan lengkap (P21) namun belum dilakukan Tahap 2.
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka NISW telah telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap 2).
109. Dugaan TPK terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak dengan menggunakan Anggaran APBN-P Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang oleh Polres Tanjung Pinang.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Polres Tanjung Pinang pada 3 Mei 2018 di Ruang Rapat Lt. 12 Gedung Merah Putih KPK.
110. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015 atas nama tersangka MS oleh Kejati Jawa Timur.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka MS telah dinyatakan lengkap (P21) berdasarkan surat Kajati Jawa Timur nomor: B-2679/O.5.5/Ft.1/05/2017, tanggal 09 Mei 2017.
111. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015 atas nama tersangka MS oleh Kejati Jawa Timur.
    - Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka MS telah dinyatakan lengkap (P21).
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka MS telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap 2) berdasarkan surat Kajati Jawa Timur nomor: B-2682/O.5.5/Ft.1/05/2017 tanggal 10 Mei 2017.
112. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015 atas nama tersangka MS oleh Kejati Jawa Timur.
    - Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka MS telah P21 dan dilakukan Tahap 2.
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka MS telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasa Nomor: 81/O.5.14/Biasa/Ft.1/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017
113. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015 atas nama tersangka A oleh Kejati Jawa Timur.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka A telah dinyatakan lengkap (P21) berdasarkan surat Kajati Jawa Timur nomor: B-2678/O.5.5/Ft.1/05/2017, tanggal 09 Mei 2017.
114. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015 atas nama tersangka A oleh Kejati Jawa Timur.
    - Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka A telah dinyatakan lengkap (P21).
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka A telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap 2) berdasarkan surat Kajati Jawa Timur nomor: B-2681/O.5.5/Ft.1/05/2017, tanggal 10 Mei 2017.
115. Dugaan TPK dengan melakukan penyimpangan pada Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015 atas nama tersangka A oleh Kejati Jawa Timur.
    - Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka A telah P21 dan dilakukan Tahap 2.
    - Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka A telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Pemeriksaan Biasa Nomor: 80/O.5.14/Biasa/Ft.1/08/2017 tanggal 03 Agustus 2017.
116. Dugaan TPK pada Penyewaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipinjam pakaikan kepada pengurus PWI Cabang Sulawesi Selatan yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Selatan.
    - Kegiatan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Jaksa Peneliti Kejati Sulawesi Selatan pada 17 Mei 2018.
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
117. Dugaan TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diurus atau diawasinya atas nama tersangka Drs. ERWIN SYAFERUDDIN HAIJA, M.Ak yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan.
    - Kegiatan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Sulsel pada 17 Mei 2018.
    - Hasil Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
118. Dugaan TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diurus atau diawasinya atas nama tersangka Drs. ERWIN SYAFERUDDIN HAIJA, M.Ak yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulsel.
    - Kegiatan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Sulsel pada 17 Mei 2018.
    - Hasil Supervisi: Perkara sudah P-21 dengan Surat Nomor: B-1802/R.4.5/Ft.1/05/2018 tanggal 24 Mei 2018
119. Dugaan TPK Belanja Upah Kerja/ *Land Clearing* atas Giat Pengembangan Perluasan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulbar.
    - Kegiatan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Sulbar pada 22 Mei 2018.
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
120. Dugaan TPK Pengadaan Bahan dan Alat Peraga Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2016 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulbar.
    - Kegiatan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Sulawesi Barat pada 22 Mei 2018.
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidan Penindakan melalui Nota Dinas.
121. Dugaan TPK dalam Kegiatan Penggunaan Dana Ganti Uang (GU) ke-3 di Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kab. Mamuju Utara yang penyidikannya dilakukan oleh Polres Mamuju Utara.
    - Kegiatan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polda Sulbar pada 22 Mei 2018.
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas
122. Dugaan TPK dalam Kegiatan Membangun Kemitraan Kebudayaan Antar Daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bengkulu Selatan TA.2011 yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Bengkulu.
    - Kegiatan Supervisi: Perkara sudah P21 pada 8 Desember 2017 dan Tahap II pada 10 Januari 2018.
    - Hasil Supervisi: Perkara telah limpah ke Pengadilan Tipikor Bengkulu (P-31) pada 26 Februari 2018
123. Dugaan TPK pada Pembangunan Terminal Transit Tipe B Passo Kota Ambon TA 2008-2009 yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.
    - Kegiatan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Kejati Maluku dan BPK RI pada 3 Mei 2018.
    - Hasil Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.
124. Dugaan TPK pada Pembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap I TA 2015 dan Tahap II TA 2016 yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.

- Kegiatan Supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik Kejati Maluku dan BPK RI pada 3 Mei 2018.
- Hasil Supervisi: Telah dilaporkan ke Deputi Bidang Penindakan melalui Nota Dinas.

125. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas nama tersangka TJ yang ditangani oleh Polda Sumsel.
    - Posisi sebelum supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejati Sumsel nomor B-862/N.6.5/Ft.1/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.
    - Posisi setelah supervisi: Telah dilaksanakan Tahap II berdasarkan Surat Polda Sumsel nomor SPB/26.c/II/2018/KOR/DITRESKRIMSUS pada tanggal 13 Februari 2018.
126. Dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Pemeriksa Pajak terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Cengkareng Jakarta Barat untuk Tahun Pajak 2016 yang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara merupakan hasil penyelidikan KPK dan akan dilakukan pelimpahan penanganan perkara *a quo* kepada APH lain.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Dit. Penyelidikan KPK, IBI KMK, dan Kejaksaan RI pada 28 Juni 2018 di Ruang Rapat Lt. 11 Gedung Merah Putih KPK dengan simpulan dan rekomendasi bahwa Tim Kejaksaan RI akan melaporkan hasil dari gelar perkara kepada pimpinannya untuk mendapatkan petunjuk mekanisme penerimaan pelimpahan serta KPK akan memfasilitasi kegiatan yang diperlukan pada tahap penyidikan perkara setelah memperoleh permintaan tertulis dari penyidik.
127. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum ditetapkan tersangka lain.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Ir. JONAITA NASIR Als JONET Bin AHMAD NASIR telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-1783/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
128. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum di tetapkan tersangka lain.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama KEMBAR NAINGGOLAN Bin C. NAINGGOLAN telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-1784/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
129. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum di tetapkan tersangka lain.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama FAISAL UTAMA Bin DAMAN HURI telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-1785/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
130. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum di tetapkan tersangka lain.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama Ir. SARJONO Bin ZAMRI telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-1786/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
131. Dugaan TPK penyertaan modal Pemerintah Daerah Kab. Nias pada PT. Riau Airlines TA 2007 sebesar Rp.6.000.000.000 atas nama tersangka BBB yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Nias.
    - Posisi sebelum supervisi: Berkas Perkara atas nama BBB telah dinyatakan lengkap (P-21) dan telah dilaksanakan Tahap II.
    - Hasil supervisi: Perkara atas nama BBBtelah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor: 94/Pid. Sus-TPK/2017/PN Mdn.
132. Dugaan TPK Rehab Besar Pasar Bundar Kota Binjai TA 2012 atas nama A (Direktur PT. Bhakti Karya Nusa Pratama) dan HSN selaku PPK yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Binjai.
    - Posisi sebelum supervisi: Berkas Perkara atas nama A telah dinyatakan lengkap (P-21) dan telah dilaksanakan Tahap II.
    - Hasil supervisi: Perkara atas nama A telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor: 83/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn.
133. Dugaan TPK Rehab Besar Pasar Bundar Kota Binjai TA 2012 atas nama tersangka A (Direktur PT. Bhakti Karya Nusa Pratama) dan HSN selaku PPK yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Binjai.
    - Posisi sebelum supervisi: Berkas Perkara atas nama HSN telah dinyatakan lengkap (P-21) dan telah dilaksanakan Tahap II.
    - Hasil supervisi: Perkara atas nama HSN telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor: 84/Pid. Sus-TPK/2017/PN Mdn.
134. Dugaan TPK dalam pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Kejari Minahasa Selatan dan KPK pada 16 Juli 2018.
135. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
    - Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka CW sudah P-21 berdasarkan surat Kajari Minahasa Selatan tanggal 12 Juli 2018 Nomor: B-1413/R.1.17/Ft.1/07/2018.
136. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
    - Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka SYP sudah P-21 berdasarkan surat Kajari Minahasa Selatan tanggal 12 Juli 2018 Nomor: B-1414/R.1.17/Ft.1/07/2018.
137. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka HMJK sudah P-21 berdasarkan surat Kajari Minahasa Selatan tanggal 12 Juli 2018 Nomor: B-1415/R.1.17/Ft.1/07/2018.
138. Dugaan TPK Pembangunan Ruko di Jalan Gajah Mada Kota Palu Milik Pemda Kab. Donggala dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 11.211.459.550 dari Pagu Anggaran sebesar Rp.11.250.000.000 yang Dananya bersumber dari APBD TA. 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Tengah.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara *a quo* masih dalam tahap penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan atas nama tersangka Y telah dinyatakan lengkap (P-21).
139. Dugaan TPK Pembangunan Ruko di Jalan Gajah Mada Kota Palu Milik Pemda Kab. Donggala dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 11.211.459.550 dari Pagu Anggaran sebesar Rp.11.250.000.000 yang Dananya bersumber dari APBD TA. 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Tengah.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara *a quo* masih dalam tahap penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara Penyidikan atas nama tersangka IS telah dinyatakan lengkap (P-21).
140. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RSUD dr. RASIDIN Padang Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Padang.
    - Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan Gelar Perkara bersama antara Penyidik pada Polresta Padang dan KPK pada 15 Juli 2018.
141. Dugaan TPK Pengelolaan Dana APB Kampung Jati Mulya yang dilakukan oleh Penghulu Kampung Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak TA 2015 atas nama tersangka MH yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Siak.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Siak, Jaksa Peneliti Kejari Siak, Jaksa pada Kejati Riau, serta KPK pada 25 April 2018, yang pada intinya dalam rangka memperkuat unsur melawan hukum, penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tersebut serta perlunya pemahaman bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka MH telah dinyatakan lengkap

(P-21) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Siak Nomor B-1402/N.4.14.8/Fd.1/06/2018 tanggal 7 Juni 2018.

142. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Gorontalo, Jaksa Kejati Gorontalo, dan KPK pada 23 Mei 2017, yang pada intinya Penyidik Polda Gorontalo belum menemukan aliran dana dan aset para pihak terkait perkara *a quo* dan Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli PPATK dan fasilitasi pelacakan aset setelah mendapat permintaan tertulis dari Penyidik Polda Gorontalo.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara Atas nama tersangka SS telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajati Gorontalo Nomor B-1640/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017.
143. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SS telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajati Gorontalo Nomor B-1640/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SS Telah Tahap II dengan Surat Kapolda Gorontalo Nomor R/170/XII/2017/PoldaGtlo tanggal 7 Desember 2017.
144. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara SS Telah Tahap II dengan Surat Kapolda Gorontalo Nomor R/170/XII/2017/PoldaGtlo tanggal 7 Desember 2017.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SS dinyatakan *inkracht* berdasarkan Salinan putusan dari Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PNGto.
145. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Gorontalo, Jaksa Kejati Gorontalo, dan KPK pada 23 Mei 2017, yang pada intinya Penyidik Polda Gorontalo belum menemukan aliran dana dan aset para pihak terkait perkara *a quo* dan Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli PPATK dan fasilitasi pelacakan aset setelah mendapat permintaan tertulis dari Penyidik Polda Gorontalo.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka Sy telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajati Gorontalo Nomor B-1638/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017.
146. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka S telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajati Gorontalo Nomor B-1638/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka S Telah Tahap II dengan Surat Kapolda Gorontalo Nomor R/169/XII/2017/PoldaGtlo tanggal 7 Desember 2017.
147. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka S Telah Tahap II dengan Surat Kapolda Gorontalo Nomor R/169/XII/2017/PoldaGtlo tanggal 7 Desember 2017.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka S dinyatakan *inkracht* berdasarkan Salinan putusan dari Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PNGto.
148. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan. Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Polda Gorontalo, Jaksa Kejati Gorontalo, dan KPK pada 23 Mei 2017, yang pada intinya Penyidik Polda Gorontalo belum menemukan aliran dana dan aset para pihak terkait perkara *a quo* dan Unit Koorsup akan memfasilitasi ahli PPATK dan fasilitasi pelacakan aset setelah mendapat permintaan tertulis dari Penyidik Polda Gorontalo.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka IM telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajati Gorontalo Nomor B-1639/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017.
149. Dugaan TPK penyimpangan dalam pengadaan peralatan fasilitas kantor gedung kuliah keperawatan Tahap II Politeknik Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka IM telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan Surat Kajati Gorontalo Nomor B-1639/R.5/Ft.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017.
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka IM Telah Tahap II dengan Surat Kapolda Gorontalo Nomor R/56/XII/2017/PoldaGtlo tanggal 6 Desember 2017.
150. Dugaan TPK penyimpangan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada BNNP Gorontalo Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Gorontalo.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap II (pengiriman tersangka IM dan barang bukti) berdasarkan Surat Polda Gorontalo Nomor R/18/V/2017/PoldaGtlo tanggal 03 Mei 2017 dan Berita Acara penyerahan tersangka dan barang bukti tanggal 04 Mei 2017 ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Irvan Mobie telah dinyatakan *inkracht* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PNGtlo tanggal 29 September 2017.
151. Dugaan TPK dalam pengadaan peralatan Laboratorium pada Universitas Negeri Gorontalo Tahun Anggaran 2010 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap II pengiriman tersangka NNS dan barang bukti
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama Nawir Noho Sune telah dinyatakan *inkracht* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PNGtlo tanggal 20 Oktober 2017.
152. Dugaan TPK program pengembangan wirausaha pemula perikanan budidaya rumput laut pemula Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran (TA) 2010 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap II pengiriman tersangka WL dan barang bukti
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka WL dinyatakan *inkracht*, dibuktikan dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dari Kejari Boalemo Nomor Print-12/R.5.12/Fu/01/2018 tanggal 22 Januari 2018.
153. Dugaan TPK penyalahgunaan Dana PNPM MP3KI pada Pekerjaan Tambatan Perahu di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo TA 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Gorontalo.
    - Posisi sebelum Supervisi: Berkas perkara atas nama RA telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejari Boalemo Nomor B-343/R.5.12/Ft.1/08/2017 pada 10 Agustus 2017
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama RA telah dinyatakan *inkracht* berdasarkan Surat Perintah Pelakanaan Putusan Pengadilan dari Kejari Boalemo Nomor Print-28/R.5.12/Fu/06/2018 tanggal 28 Juni 2018.
154. Dugaan TPK penyalahgunaan Dana PNPM MP3KI pada Pekerjaan Tambatan Perahu di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo TA 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Gorontalo.
    - Posisi Supervisi: Berkas perkara atas nama BR telah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejari Boalemo Nomor B-344/R.5.12/Ft.1/08/2017 pada 10 Agustus 2017
    - Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama BR telah dinyatakan *inkracht* berdasarkan Surat Perintah Pelakanaan Putusan Pengadilan dari Kejari Boalemo Nomor Print-30/R.5.12/Fu/06/2018 tanggal 6 Juli 2018.
155. Dugaan TPK pada layanan fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tahun 2013 dan 2014 pada PT. Bank Mandiri (Persero) cabang Samratulangi Jambi yang disidik oleh Polda Jambi;
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 18 Juli 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
156. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang disidik oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 18 Juli 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
157. Dugaan TPK dan dugaan tindak pidana

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atas penyalahgunaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas pada Pemerintah Kota Batam yang ditempatkan pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) yang disidik dan dilakukan penuntutan oleh Kejati Kepulauan Riau.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara sudah dalam tingkat penuntutan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
- Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada 25 Juli 2018 dan telah diberikan rekomendasi.

158. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum di tetapkan tersangka lain.
    - Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama JN Bin AN telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-1783/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
159. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum di tetapkan tersangka lain.
    - Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama KN Bin CN telah telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-1783/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
160. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum di tetapkan tersangka lain.
    - Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama FU Bin DH telah telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-1783/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018
161. Dugaan TPK pada Pengadaan Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tebo TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya serta belum di tetapkan tersangka lain.
    - Hasil supervisi: Berkas Perkara atas nama S Bin Z telah telah dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka (Tahap II) berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor: B-1783/N.5.5/Ft.1/06/2018 tanggal 6 Juni 2018.
162. Dugaan TPK dana hibah dari Pemkot. Pasuruan kepada KONI kota Pasuruan untuk kegiatan PSSI cabang Kota Pasuruan yang bersumber dari APBD kota Pasuruan TA 2013, TA 2014 dan TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jatim.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 11 Juli 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
163. Dugaan TPK dalam pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Ngimbang-Bluluk (km. 2+200-km. 2+500 dan km. 2+800-km. 4+900) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan yang bersumber dari APBD Tahun 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jatim.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 11 Juli 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
164. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan penggunaan APBDES Wringintelu Kec. Puger Kab. Jember TA 2013, 2014 dan 2015 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sewa Tanah Kas Desa (TKD) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Jember.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 12 Juli 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
165. Dugaan TPK pada pelaksanaan kegiatan PRONA Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember TA 2013-2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Jember.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 12 Juli 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
166. Dugaan TPK pada pengadaan jasa kebersihan Program Kali Bersih (Prokasih) dan penyediaan jasa tenaga operasional composting pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Magetan TA 2013 dan 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Magetan.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 12 Juli 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
167. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2015-2017 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Bojonegoro.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 10 Juli 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
168. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh TA 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama dengan Penyidik Kejati Aceh dan Auditor BPK RI pada 02 Juli 2018.
169. Dugaan TPK Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN TA 2015 dan 2016 Periode Januari-April 2016 dan Dana BOMM/SSM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu-Subsidi Sekolah Menengah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Polewali Mandar.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polres Polewali Mandar, Penyidik Polda Sulbar, Jaksa pada Kejari Polewali Mandar dan Jaksa pada Kejati Sulsel pada 25 Juli 2018.
170. Dugaan TPK Penggunaan Dana Ganti Uang (GU) ke-3 TA 2013 di Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Mamuju Utara yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Mamuju Utara.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polres Mamuju Utara, Penyidik Polda Sulbar, Jaksa pada Kejari Mamuju
171. Dugaan TPK berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yang Penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan.
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri, Penyelidik KPK, dan KPK pada 30 Juli 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan.
172. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tahun anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan, penyidik belum menetapkan pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
    - Hasil supervisi: Tanggal 17 Juli 2018 Penyidik Kejari Sumsel telah menetapkan tersangka atas nama ARM sesuai surat nomor B-3273/N.6.10/ Fd.1/07/2018 tanggal 17 Juli 2018.
173. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/ lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap penyidikan, penyidik belum menetapkan pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
    - Hasil Supervisi: Tanggal 17 Juli 2018 Penyidik Kejari Sumsel telah menetapkan tersangka atas nama M sesuai surat nomor B-3273/N.6.10/ Fd.1/07/2018 tanggal 17 Juli 2018.
174. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.

- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan, penyidik belum menetapkan pihak penyedia barang jasa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
- Hasil supervisi: Tanggal 4 Juli 2018 Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka atas nama ARL sesuai surat nomor R/58/VII/ 2018/Tipidkor tanggal 4 Juli 2018.

175. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan, penyidik belum menetapkan pihak penyedia barang jasa yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
    - Hasil supervisi: Tanggal 19 Juli 2018 Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan korporasi sebagai tersangka sesuai surat nomor SPDP/21/VII/ 2018/ Tipidkor tanggal 19 Juli 2018.
176. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas nama terdakwa Teddi Juniastanto yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sumsel.
    - Posisi sebelum supervisi: tahap persidangan.
    - Hasil supervisi: Dakwaan terbukti dengan putusan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
177. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: P-21.
    - Hasil Supervisi: Pengiriman Barang Bukti dan Penyerahan tersangka (Tahap II) atas nama tersangka CYW telah dilaksanakan berdasarkan surat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 23 Juli 2018 Nomor: B-1477/R.1.17/Ft.2/07/2018.
178. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: P-21.
    - Hasil Supervisi: Pengiriman Barang Bukti dan Penyerahan tersangka (Tahap II) atas nama tersangka SYP telah dilaksanakan berdasarkan surat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 23 Juli 2018 Nomor: B-1478/R.1.17/Ft.2/07/2018.
179. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: P-21.
    - Hasil Supervisi: Pengiriman Barang Bukti dan Penyerahan tersangka (Tahap II) atas nama tersangka HMJK telah dilaksanakan berdasarkan surat Penyidik pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 23 Juli 2018 Nomor: B-1479/R.1.17/Ft.2/07/2018.
180. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka A sudah P-21 berdasarkan surat Kajari Tapanuli Selatan tanggal 21 Mei 2018 Nomor: B-658/N.2.36/Fd.1/05/2018.
181. Dugaan TPK penyimpangan dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kel. Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Selatan TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Minahasa Selatan.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
    - Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka N alias NH sudah P-21 berdasarkan surat Kajari Tapanuli Selatan tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: B-1090/N.2.36/Fd.1/05/2018.
182. Dugaan TPK dalam kegiatan dukungan PON XIX-Peningkatan Jalas Tarisi-Batudua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang TA 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Jawa Barat, Bareskrim Polri serta KPK pada 15 Agustus 2018, dengan 7 (tujuh) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
183. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Tempat Pemakaman Umum KM. 15 Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Balikpapan.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Balikpapan, Penyidik Bareskrim Polri, dan KPK pada 24 Agustus 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
184. Dugaan TPK Penyimpangan pada Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan fasilitas umum lainnya yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Gorontalo.
    - Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Kejati Gorontalo dan KPK pada 28 Agustus 2018 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
185. Dugaan TPK berupa suap atas pemberian izin pemanfaatan kayu (IPK) kepada PT. SATYA JAYA ABADI oleh Pemda Kab. Buton Selatan untuk pengelolaan kayu jati di Kec. Sampolawa Kab. Buton Selatan yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang disidik oleh Polda Sulawesi Tenggara.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 8 Agustus 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
186. Dugaan Penyimpangan/penyelewengan Keuangan Negara pada pembayaran dana kegiatan proyek/pekerjaan yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran dengan menggunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Muna TA 2015 yang disidik oleh Kejari Muna.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 9 Agustus 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
187. Dugaan Penyimpangan / penyelewengan Keuangan Negara pada pengelolaan keuangan daerah (Deposito) Kabupaten Muna Tahun 2014-2015 yang disidik oleh Kejari Muna.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara sudah dalam tingkat penuntutan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 9 Agustus 2018 dan telah diberikan rekomendasi..
188. Dugaan TPK pada kegiatan pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Kerinci TA 2010-2014 diatas lahan yang tidak terdapat hak diatasnya yang disidik oleh Kejati Jambi
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 15 Agustus 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
189. Dugaan TPK dalam penyaluran dana bantuan sosial program peningkatan pendidikan TA 2013-2014 yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Jambi TA 2013-2014 yang disidik oleh Kejati Jambi.
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 15 Agustus 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
190. Dugaan TPK Pembangunan Jaringan Air Bersih Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2009-2010 yang disidik oleh Kejati Jambi
    - Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
    - Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara *a quo* dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Penyidik pada 15 Agustus 2018 dan telah diberikan rekomendasi.
191. Dugaan TPK Pengadaan Alat Komputer Lab Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Rejang Lebong.
    - Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
    - Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama dengan Penyidik Polres Rejang Lebong pada 15 Agustus 2018. Dengan 16 (enam belas) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
192. Dugaan TPK dalam Kegiatan Membangun Kemitraan Kebudayaan Antar Daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bengkulu Selatan TA.2011 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polda Bengkulu.
    - Posisi sebelum Supervisi: Perkara telah limpah ke Pengadilan Tipikor Bengkulu (P-31) pada 26 Februari 2018
    - Hasil Supervisi: Perkara telah *inkracht* dengan Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL tanggal 17 Juli 2018
193. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/ lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang tahun

anggaran 2015 atas nama tersangka ARM dan tersangka M yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan.
- Hasil Supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejari Palembang nomor: B-4456/N.6.10/Fd.1/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

194. Dugaan TPK Penerbitan Sertifikat No. 475 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
- Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Kejari Kotawaringin Timur dan KPK bersama dengan Pidsus dan pengawasan Kejaksaan Agung RI pada 14 Agustus 2018 dengan 7 (tujuh) kesimpulan dan 2 (dua) rekomendasi.

195. Dugaan TPK Pelaksanaan Program IP4T Tahun 2014 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap persidangan.
- Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Kejari Kotawaringin Timur dan KPK bersama dengan Pidsus dan pengawasan Kejaksaan Agung RI pada 14 Agustus 2018 dengan 7 (tujuh) kesimpulan dan 2 (dua) rekomendasi.

196. Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Program IP4T Tahun 2014 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur dan dari TPK dalam Penerbitan Sertifikat No. 475 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur diatas Tanah Milik Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
- Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Kejari Kotawaringin Timur dan KPK bersama dengan Pidsus dan pengawasan Kejaksaan Agung RI pada 14 Agustus 2018 dengan 7 (tujuh) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.

197. Dugaan TPK dalam Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kumuh Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2016 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Pulang Pisau.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
- Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Kejari Pulang Pisau dan KPK bersama dengan Pidsus dan pengawasan Kejaksaan Agung RI pada 14 Agustus 2018 dengan 8 (delapan) kesimpulan dan 2 (dua) rekomendasi.

198. Dugaan TPK dalam hal tidak melakukan pencatatan putusan dan atau penetapan Pengadilan Negeri Padang pada peta pendaftaran dan atau warkah sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Padang, sehingga terjadinya penerbitan sertipikat, peralihan hak dan adanya pembebanan hak tanggungan untuk agunan kredit di bank pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap tanah pada objek putusan dan atau penetapan pengadilan dimaksud yang terjadi sejak tahun 1982 sampai 2017 di Kantor Pertanahan Kota Padang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumatera Barat.
- Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
- Hasil Supervisi: Telah dilaksanakan Gelar Perkara bersama antara Penyidik pada Polda Sumatera Barat dan KPK pada 18 September 2018 dengan 3 (tiga) simpulan dan rekomendasi.

199. Dugaan TPK Pengadaan Mesin Boat BF 250 Tahun Anggaran 2017, Kabupaten Banggai Laut yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Banggai Laut.
- Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
- Hasil Supervisi: Telah dilaksanakan Gelar Perkara bersama antara Penyidik pada Kejari Banggai Laut dan KPK pada 27 September 2018 dengan 9 (sembilan) simpulan dan rekomendasi.

200. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2015 dengan tersangka atas nama AW yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
- Posisi setelah supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Kaltim dan KPK pada 27 September dengan 8 (delapan) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.

201. Dugaan TPK penggunaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan sosialisasi/ penyuluhan pada SKPD/ OPD seluruh wilayah kecamatan di Kota Makassar yang penyidikannya dilakukan oleh Bareskrim Polri
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
- Posisi setelah supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik pada Dit. Tipidkor Bareskrim Polri dan KPK pada 10 September 2018 dengan 9 (sembilan) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.

202. Dugaan TPK uang setoran Kas Daerah Kota Semarang pada Rekening Giro atas nama Wali Kota Cq Kas Umum Daerah pada Bank BTPN Cab. Semarang yang terjadi sejak tahun 2008-tahun 2014 di Kantor UPTD Kasda Pemkot Semarang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang.
- Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
- Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan Gelar Perkara bersama antara Penyidik pada Polrestabes Semarang dan KPK pada 1 Oktober 2018 dengan 4 (empat) simpulan dan rekomendasi.

203. Dugaan TPK dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE Dn 500 mm di kota Tembilahan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Prov. Riau pada 2013 dengan menggunakan dana APBD Provinsi Riau TA. 2013 yang penyidkan dilaksanakan oleh Polda Riau.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka EM telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-294/N.4.5/Ft.1/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

204. Dugaan TPK dan atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada kegiatan pengadaan dan pemasangan Pipa Transmisi PE Dn 500 mm di kota Tembilahan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Prov. Riau pada 2013 dengan menggunakan dana APBD Provinsi Riau TA. 2013 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Riau.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
- Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SSPS telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Nomor: B-295/N.4.5/Ft.1/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

205. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor (KIR) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Purwakarta.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
- Posisi setelah supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka DS Bin M telah dihentikan penyidikannya (SP3) melalui Surat Penghentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resor Purwakarta Nomor: SPPP/17.bb/VII/2018/Reskrim tanggal 30 Juli Tahun 2018.

206. Dugaan TPK Pengadaan Tanah Simpang Jalan Bogor Raya-Jalan Nangka TA 2015 atas nama tersangka NMI, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Depok.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
- Posisi setelah supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polresta Depok, Penyidik Polda Metro Jaya, Penydidik Dirtipidkor Bareksrim Polri, dan KPK pada 25 Oktober 2018 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 5 (lima) rekomendasi.

207. Dugaan TPK Pengadaan Tanah Simpang Jalan Bogor Raya-Jalan Nangka TA 2015 atas nama tersangka HP yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polresta Depok.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
- Posisi setelah supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polresta Depok, Penyidik Polda Metro Jaya, Penydidik Dirtipidkor Bareksrim Polri, dan KPK pada 25 Oktober 2018 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 5 (lima) rekomendasi.

208. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Posisi setelah supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka N Binti MN (Alm) telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B-239/Q-4.5/Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.

209. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Posisi setelah supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka MY Bin (Alm) MYA telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B-238/Q-4.5/Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.

210. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Posisi setelah supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka S Bin (Alm) L telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B-235/Q-4.5/Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.

211. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah

Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Posisi setelah supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka AK. Bin (Alm) FG telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B-234/Q-4.5/ Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.

212. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya oleh Polda Kalimantan Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Posisi setelah supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka CC (Alm) C telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B-236/Q-4.5/ Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.

213. Dugaan TPK Pengadaan Lahan untuk Rumah Potong Unggas (RPU) pada Dinas Pertanuan Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan TA 2018, yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan.
- Posisi setelah supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka RPM. Binti (Alm) S telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: B-237/Q-4.5/ Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018.

214. Dugaan TPK Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan penggunaan APBDes Wringintelu Kec. Puger Kab. Jember TA 2013, 2014 dan 2015 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sewa tanah Kas Desa (TKD) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Jember.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya (Tersangka DPO)
- Pelaksanaan Supervisi: Tersangka atas nama SB telah ditemukan, dan berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) pada 28 September 2018.

215. Dugaan TPK Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan penggunaan APBDes Wringintelu Kec. Puger Kab. Jember TA 2013, 2014 dan 2015 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan sewa tanah Kas Desa (TKD) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya (Tersangka DPO)
- Pelaksanaan Supervisi: Tersangka atas nama SB telah diserahterimakan kepada JPU (Tahap II) pada 12 Oktober 2018.

216. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejati Aceh.
- Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
- Hasil Supervisi: Perkara *a quo* atas nama tersangka HS Bin (alm) SR telah P-21 dengan Nomor Surat: B.3/34A/N.1.5/ Ft.1/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

217. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Kejati Aceh.
- Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
- Hasil Supervisi: Perkara *a quo* atas nama tersangka Y, telah P-21 dengan Nomor Surat: B.3/34B/N.1.5/Ft.1/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018.

218. Dugaan TPK pekerjaan pengadaan tangga elektronik/lift pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2015 atas nama tersangka ARM dan tersangka M yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Palembang.
- Posisi sebelum supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejari Palembang nomor: B-4456/N.6.10/Fd.1/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
- Hasil supervisi: Telah dilakukan tahap II pada 18 September 2018.

219. Dugaan TPK penggunaan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan sosialisasi/ penyuluhan pada SKPD/ OPD seluruh wilayah kecamatan di Kota Makassar yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan, penyidik belum menetapkan pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana
- Posisi setelah supervisi: Tanggal 12 September 2018 penyidik telah menetapkan tersangka atas nama ESH sesuai surat Dit Tipidkor Bareskrim Polri nomor: SP2HP/373/IX/2018/Tipidkor tanggal 14 September 2018.

220. Dugaan TPK Penerbitan Sertifikat No. 475 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
- Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur nomor: B-120/Q.2.11/Fd.1/09/2018 tanggal 20 September 2018

221. Dugaan TPK Penerbitan Sertifikat No. 475 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Kotawaringin Timur
- Posisi sebelum supervisi: P-21 berdasarkan berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur nomor: B-120/Q.2.11/ Fd.1/09/2018 tanggal 20 September 2018
- Hasil supervisi: Telah dilakukan tahap II pada 25 September 2018.

222. Dugaan TPK pengadaan tenaga ahli perseorangan dan jasa konsultansi pada Satker BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR TA 2016 yang ditelaah oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat.
- Posisi sebelum supervisi: kasus masih dalam telaahan Direktorat Pengaduan Masyarakat dan belum ditemukan indikasi keterlibatan PN, sehingga dapat diteruskan kepada APH lain.
- Posisi setelah supervisi: KPK mensupervisi kasus ini dengan melakukan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 01 November 2018 di Gedung Merah Putih KPK dengan simpulan bahwa kasus layak untuk ditindaklanjuti dan akan dilakukan serah terima copy dokumen dari hasil pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

223. Dugaan TPK Program PNPM-Mpd dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pinduhurani Kec. Tabundung Kabupaten Sumba Timur NTT TA 2011 atas nama tersangka AR alias A yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Sumba Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih di tingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
- Pelaksanaan supervisi: KPK mensupervisi perkara ini dengan melakukan gelar perkara bersama dengan Polres Sumba Timur, Kejari Sumba Timur dan Ahli dari LKPP pada 09 November 2018 di Polres Sumba Timur.

224. Dugaan TPK uang setoran Kas Daerah Kota Semarang pada Rekening Giro atas nama Wali Kota Cq Kas Umum Daerah pada Bank BTPN Cab. Semarang yang terjadi sejak tahun 2008-tahun 2014 di Kantor UPTD Kasda Pemkot Semarang yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polrestabes Semarang.
- Posisi sebelum Supervisi: Penanganan perkara *a quo* masih dalam proses penyidikan.
- Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan Gelar Perkara bersama antara Penyidik pada Polrestabes Semarang dan KPK pada 1 Oktober 2018 dengan 4 (empat) simpulan dan rekomendasi.

225. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
- Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Polda Kaltim, KPK, dan Bareskrim Polri pada 13 Oktober 2016 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka Noorhayati telah P-21 berdasarkan surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor B-219/Q-4.5/ Fd.1/9/2018 tanggal 6 September 2018.

226. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
- Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka N telah P-21 berdasarkan surat Nomor B-219/Q-4.5/ Fd.1/9/2018 tanggal 6 September 2018.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka N telah Tahap II berdasarkan surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor B/07.b/IX/RES.3.3/2018/ Ditreskrimsus tanggal 21 September 2018.

227. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
- Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara penyidik Polda Kaltim, KPK, dan Bareskrim Polri pada 13 Oktober 2016 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka DS telah P-21.

228. Dugaan TPK pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni dan Gedung Autis Center di Pemkot Bontang Kaltim Tahun Anggaran 2012 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Penyidik Polda Kaltim.
- Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka DS telah P-21.
- Hasil Supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka DS telah Tahap II berdasarkan surat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Nomor B/08.b/IX/RES.3.3/2018/ Ditreskrimsus tanggal 21 September 2018.

229. Dugaan TPK berupa penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Kegiatan Pemberian Dana Hibah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kab. Bengkalis Tahun Anggaran 2012 atas nama tersangka SA dan atas nama tersangka YV

yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Kampar.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
- Pelaksanaan supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polres Kampar, Penyidik Polda Riau, Jaksa Peneliti pada Kejari Kampar, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Riau, serta KPK pada 8 November 2018 dengan 9 (sembilan) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.

230. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB, serta Kedaraan Kusus di RSUD Kab. Badung TA 2013 atas nama Terdakwa I Ketut Sukartayasa yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Persidangan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Terdakwa I Ketut Sukartayasa telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar berdasarkan Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.DPS tanggal 8 Januari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.

231. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB, serta Kendaraan Khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013 atas nama Terdakwa Muhammad Yani Khanifudin yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Persidangan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Terdakwa atas nama Terdakwa Muhammad Yani Khanifudin telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar berdasarkan Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.DPS tanggal 8 Januari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.

232. Dugaan TPK Pengadaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan KB, serta Kendaraan Khusus di RSUD Kab. Badung TA 2013, atas nama Terdakwa I Made Susila yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Bali.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Persidangan.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Terdakwa atas nama Terdakwa I Made Susila telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar berdasarkan Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.DPS tanggal 3 Oktober 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap.

233. Dugaan TPK di Dinas Pendidikan Kab. Garut TA 2015 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan berupa pengadaan peralatan geologi pertambangan untuk SMKN 2 Garut atas nama tersangka WS Bin YS yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
- Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Bali dan KPK pada 1 November 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka WS Bin YS telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nomor: B-1369/0.2.16/Ft.1/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

234. Dugaan TPK di Dinas Pendidikan Kab. Garut TA 2015 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan berupa pengadaan peralatan geologi pertambangan untuk SMKN 2 Garut atas nama tersangka TK Bin OR yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
- Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Bali dan KPK pada 1 November 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka TK Bin OR telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nomor: B-917/0.2.16/Ft.1/05/2017 tanggal 24 Mei 2017.

235. Dugaan TPK di Dinas Pendidikan Kab. Garut TA 2015 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan berupa pengadaan peralatan geologi pertambangan untuk SMKN 2 Garut atas nama tersangka S dkk yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
- Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Bali dan KPK pada 1 November 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
- Hasil Supervisi supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka TK Bin OR telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nomor: B-916/0.2.16/Ft.1/05/2017 tanggal 24 Mei 2017.

236. Dugaan TPK di Dinas Pendidikan Kab. Garut TA 2015 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan berupa pengadaan peralatan geologi pertambangan untuk SMKN 2 Garut atas nama tersangka WS Bin YS yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
- Posisi sebelum supervisi: Telah dilaksanakan gelar perkara antara Penyidik Polda Bali dan KPK pada 1 November 2018 dengan 4 (empat) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka WS Bin YS telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Bandung melalui Surat Pelimpahan Perkara Nomor: PDS-08/Ft.1/Grt/09/2018 tanggal 19 September 2018.

237. Dugaan TPK di Dinas Pendidikan Kab. Garut TA 2015 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan berupa pengadaan peralatan geologi pertambangan untuk SMKN 2 Garut atas nama tersangka S Dkk yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka S dkk telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Bandung berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 61/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg tanggal 14 November 2017.

238. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka PP Bin BS telah dinyatakan lengkap (P-21) pada 16 Oktober 2018.

239. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka DY Bin D telah dinyatakan lengkap (P-21) pada 16 Oktober 2018.

240. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka IM Bin NG telah dinyatakan lengkap (P-21) pada 16 Oktober 2018.

241. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka GF Bin AI telah dinyatakan lengkap (P-21) pada 30 Agustus 2018.

242. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya.
- Hasil Supervisi: Berkas Perkara atas nama tersangka DE Bin AH telah dinyatakan lengkap (P-21) pada 30 Agustus 2018.

243. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
- Hasil Supervisi: Tersangka atas nama PP Bin BS telah diserahterimakan kepada JPU (Tahap II) pada 31 Oktober 2018.

244. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
- Hasil Supervisi: Tersangka atas nama DY Bin D telah diserahterimakan kepada JPU (Tahap II) pada 31 Oktober 2018.

245. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
- Hasil Supervisi: Tersangka atas nama IM Bin NG telah diserahterimakan kepada JPU (Tahap II) pada 31 Oktober 2018.

246. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten Tebo Periode 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
- Hasil Supervisi: Tersangka atas nama GF Bin A telah diserahterimakan kepada JPU (Tahap II) pada 30 Oktober 2018.

247. Dugaan TPK Fasilitasi Layanan Kredit Usaha rakyat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di KCP Sumber Agung Blok E Rimbo ILIR Kabupaten

Tebo Periode 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Jambi.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terdapat kendala dalam penanganannya
- Hasil Supervisi: Tersangka atas nama DI Bin AH telah diserahterimakan kepada JPU (Tahap II) pada 30 Oktober 2018.

248. Dugaan TPK pada Penyewaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipinjam pakaikan kepada pengurus PWI Cabang Sulawesi Selatan yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sulsel.
- Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
- Hasil Supervisi: Perkara *a quo* atas nama tersangka ZGO telah P-21 dengan Nomor Surat: B-3661/R.4.5//Ft.1/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

249. Dugaan TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang turut serta dalam pengadaan barang dan jasa yang diurus atau diawasinya atas nama tersangka Drs. ERWIN SYAFERUDDIN HAIJA, M.Ak yang penyidikannya dilakukan oleh Polda Sulsel.
- Posisi sebelum Supervisi: Perkara telah P-21 dengan Nomor Surat: B-1802/R.4.5/Ft.1/05/2018 tanggal 24 Mei 2018.
- Hasil Supervisi: Perkara *a quo* atas nama tersangka ESH telah Tahap II dengan Surat Nomor: C1.02/41/V/2018/Dit Reskrimsus tanggal 24 Mei 2018.

250. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Aceh.
- Posisi sebelum Supervisi: Perkara *a quo* atas nama tersangka HS Bin (alm) SR telah P-21.
- Hasil Supervisi: Perkara *a quo* atas nama tersangka HS Bin (alm) SR telah dilaksanakan Tahap II dengan P15 Nomor: Print-665/N.1.5/Fd.1/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan P15A Nomor: Print-723/N.1.5/Fd.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018.

251. Dugaan TPK Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Aceh.
- Posisi sebelum Supervisi: Perkara *a quo* atas nama tersangka Y telah P-21.
- Hasil Supervisi: Perkara *a quo* atas nama tersangka Y telah dilaksanakan Tahap II dengan P15 Nomor: Print-664/N.1.5/Fd.1/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan P15A Nomor: Print-724/N.1.5/Fd.1/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018.

252. Dugaan TPPU yang berasal dari TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
- Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
- Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan Gelar Perkara bersama antara Penyidik pada Bareskrim Polri dan KPK pada 27 November 2018 dengan 5 (lima) kesimpulan dan 4 (empat) rekomendasi.

253. Dugaan TPK program PNPM-MPd dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pinduhurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur TA 2011 atas nama Tersangka ARRON RIWONG alias AKIANG yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Sumba Timur.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka AR alias A telah mendapatkan P-21.

254. Dugaan TPK Dana Subsidi Penerbangan Pemda Kabupaten Talaud TA 2009/2010 atas nama tersangka MOCHAMAD RUSLI (Direktur PT. Aero Support International) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Talaud.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penyidikan
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama Tersangka MR telah mendapatkan P-21.

255. Dugaan TPK kegiatan penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak Desa Likupang II (Dua) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA. 2016 atas nama Terdakwa JUNJUNGAN TAMBUNAN (Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang Penyidikannya dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap Penuntutan
- Hasil supervisi: Perkara sudah diputus oleh PN Kota Manado, saat ini masih tahap Banding yang diajukan Terdakwa.

256. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan penggunaan APBDES Wringintelu Kec. Puger Kab. Jember TA 2013, 2014 dan 2015 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sewa Tanah Kas Desa (TKD) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Jember.
- Posisi sebelum supervisi: Perkara masih ditingkat penyidikan dan terkendala tersangka yang melarikan diri (DPO).
- Hasil supervisi: Tersangka atas nama SB sudah berhasil ditangkap dan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Peneliti Berkas Perkara pada Kejaksaan Negeri Jember pada 28 September 2018.

257. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dan penggunaan APBDES Wringintelu Kec. Puger Kab. Jember TA 2013, 2014 dan 2015 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sewa Tanah Kas Desa (TKD) yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polres Jember.
- Posisi sebelum supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SB sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti Berkas pada Kejaksaan Negeri Jember.
- Hasil supervisi: Berkas perkara atas nama tersangka SB sudah diserahterimakan (tahap II) oleh Polres Jember pada 12 Oktober 2018.

258. Dugaan TPK sewa tanah negara di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun 2015 yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejati Sulawesi Selatan.
- Posisi sebelum Supervisi: Tahap Penyidikan
- Pelaksanaan Supervisi: Telah dilaksanakan Gelar Perkara bersama dengan penyidik Kejati Sulawesi Selatan pada 13 Desember 2018, dengan 6 Kesimpulan dan 3 Rekomendasi

259. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas nama tersangka MT yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumsel.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan.
- Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejati Sumsel nomor B-5462/N.6.5/Ft.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018.

260. Dugaan TPK dalam kegiatan pembangunan jalan akses bandara atung bungsu 2 (dua) jalur aspal *hotmix* tahap III dengan menggunakan APBD Kota Pagaralam TA 2013 atas nama tersangka MT yang penyidikannya dilaksanakan oleh Polda Sumsel.
- Posisi sebelum supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejati Sumsel nomor B-5462/N.6.5/Ft.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018.
- Hasil supervisi:: telah dilakukan tahap II pada 13 Desember 2018.

261. Dugaan Penerimaan Suap dari PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama ke Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Selatan yakni Sdr. Hasanuddin Agani untuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (Proyek Multi Years) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018-Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Barito Selatan yang penyidikannya dilaksanakan oleh Kejari Barito Selatan
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
- Hasil supervisi:: Telah dilaksanakan gelar perkara bersama antara Penyidik Kejari Barito Selatan dan KPK pada 17 Desember 2018 dengan 6 (enam) kesimpulan dan 3 (tiga) rekomendasi.

262. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 atas nama tersangka PW yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
- Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejagung RI nomor B-121/F.3/Ft.1/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.

263. Dugaan TPK pada Pekerjaan Manajemen Proyek Pemboran Terpadu (MPPT) Blok Alas Dara Kemuning di PT. Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014 atas nama tersangka ARL yang penyidikannya dilaksanakan oleh Bareskrim Polri.
- Posisi sebelum supervisi: Tahap penyidikan
- Hasil supervisi: P-21 berdasarkan surat Kejagung RI nomor B-122/F.3/Ft.1/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM-APH

No.	Kegiatan	Tempat/ Waktu	Wilayah Hukum	Peserta	Materi
1	Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan SDM Apgakum	Pontianak, 5-9 Maret 2018.	Provinsi Kalimantan Barat	Peserta sebanyak 141 peserta, terdiri: a. Jaksa pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat: 40 peserta, b. Penyidik pada Wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Barat: 50 peserta c. Penyidik pada Puspom TNI 30 Peserta d. Oditur pada Oditur Militer: 5 peserta e. Auditor pada Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat: 4 peserta f. Auditor pada Perwakilan BPKP Perwakilan Kalimantan Barat: 10 peserta g. PPATK: 2 peserta	a. Dialog Interaktif Dengan Pimpinan Instansi Penegak Hukum dengan tema "Sinergisitas antar penegak hukum untuk efektifitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi" b. Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan oleh Sony Heru. c. Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perdagangan Internasional (Import) oleh Oke Nurwan. d. Filosofi Keuangan Negara oleh Siswo Sujanto; e. Prinsip Tata Kelola Keuangan Daerah oleh Yonatan Wiyoso f. Titik Rawan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Setya Budi Arijanta; g. Pemahaman Audit Investigatif, Audit Forensik dan Perhitungan Keuangan Negara oleh I Nyoman Wara. h. Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Yudi Kristiana; i. Potensi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Perkebunan oleh j. Strategi APH dalam menghadapi Praperadilan oleh Feri Wibisono k. Peran Koordinasi dan Supervisi oleh Unit Koorsup KPK
2	Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan SDM Apgakum	Palu, 9-13 Juli 2018.	Provinsi Sulawesi Tengah	Peserta sebanyak 158 peserta, terdiri: a. Jaksa pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 48 orang; b. Penyidik pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah: 63 orang; c. Penyidik pada POMAD, POMAL, POMAU di Provinsi Sulawesi Tengah: 10 orang; d. Oditur Militer: 8 orang; e. Auditor pada Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah: 15 orang; f. Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah: 12 orang; g. PPATK: 2 orang.	a. Dialog Interaktif Dengan Pimpinan Instansi Penegak Hukum dengan tema "Sinergisitas antar penegak hukum untuk efektifitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi". b. Titik Rawan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Setya Budi Arijanta. c. Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan oleh Sony Heru Prasetyo. d. Pemahaman Audit Investigasi, Audit Forensik, dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh I Nyoman Wara. e. Filosofi Keuangan Negara oleh Siswo Sujanto. f. Dana Desa oleh Yonatan Wiyoso. g. Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Muhammad Yusuf. h. Strategi APH dalam Menghadapi Praperadilan oleh Sarjono Turin. i. Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Arsan Latif. j. Peran Koordinasi dan Supervisi oleh Firli.
3	Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan SDM Apgakum	Bandar Lampung, 8-12 Oktober 2018.	Provinsi Lampung	Peserta sebanyak 159 peserta, terdiri: a. Jaksa pada Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung 60 peserta, b. Penyidik pada Wilayah Kepolisian Daerah Lampung 70 peserta c. Penyidik pada Puspom TNI 9 Peserta d. Oditur pada Oditur Militer 1 peserta e. Auditor pada Perwakilan BPK RI Perwakilan Lampung 10 peserta f. Auditor pada Perwakilan BPKP Perwakilan Lampung 9 peserta.	a. Dialog Interaktif Dengan Pimpinan Instansi Penegak Hukum dengan tema "Sinergisitas antar penegak hukum untuk efektifitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi"; b. Tindak Pidana Korporasi oleh Prof. Dr. Surya Djaya; c. Filosofi Keuangan Negara oleh Siswo Sujanto; d. Pemahaman Audit Investigatif, Audit Forensik dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Agustina Arumsari; e. Titik Rawan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Fahrurrazi; f. Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korporasi oleh Supardi dan Basir. g. Tindak Pidana Pencucian Uang oleh M. Yusuf; h. Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan oleh Soni Heru; i. Strategi APH dalam Menghadapi Praperadilan oleh Sarjono Turin.